



## **SKRIPSI**

### **KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018. (STUDY KASUS DIVISI PERENCANAAN PROGRAM DAN DATA)**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)

untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

**Nama : TRIMADANI DITA PRATIWI**

**NPM : 2115500051**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARRY PRASETYO

NPM : 2115500025

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul **PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN** adalah benar – benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, Juli 2019

  
  
HARRY PRASETYO  
2115500025



**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN FISIK  
DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**


Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)  
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Tegal, 23 Juli 2019

Telah disetujui oleh,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Drs. Djoko Suyono, M.Si  
NIPY.2451891956

  
Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si  
NIPY.16952681974

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si  
NIPY.16952681974



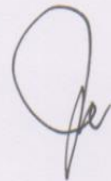


YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)  
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290

## PENGESAHAN

### PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN


Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu  
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Selasa  
Tanggal : 23 Juli 2019

1. Ketua Dewan Penguji : Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si (  )  
NIP.196305271988032001
2. Sekertaris Dewan Penguji : Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si (  )  
NIPY.16952681974
3. Anggota Dewan Penguji : Drs. Djoko Suyono, M.Si (  )  
NIPY.2451891956

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
Dr. Nuridin, SH. MH  
NIPY.9351091960

### **MOTTO**

“tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”. (Q.S. Huud: 88)

“Selalu ada Allah untuk orang yang sabar”. (Q.S. Al-Anfal: 66)

“maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S. Al Insyirah 5-6)

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”

“siapa yang bersabar pasti beruntung”

“siapa yang menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan”

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi yang telah selesai ini tentu mengalami suka maupun duka di dalam proses pembuatan dan penyusunannya, maka dari itu peneliti ingin mempersembahkan karya ilmiah ini untuk :

1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas kekuasaan dan perlindungan-Nya, telah memberikan hidayah dan karomah serta kesehatan dan semangat dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Bapak, Ibu, Kakak saya tercinta, Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak tersayang ( Sudito ), Ibuku tersayang ( Heni Mafrudah ) kakaku tersayang ( Sigit Heri Putranto dan Bachtyar Yuli Prakoso ) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasihati menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Kakak.
3. Kekasihku tersayang “Harry Prasetyo” Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberiku semangat, motivasi dan inspirasi yang tiada henti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih cinta.
4. Semua Dosen dan Dekan FISIP tanpa terkecuali yang sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan dan selesainya penelitian ini .

5. Teman-teman FISIP angkatan 2015 terimakasih banyak untuk bantuannya dan kerja samanya selama ini teman, sukses untuk kita semua
6. Semua pihak terkait yang turut membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini dari awal hingga akhir.

## ABSTRAK

Pratiwi, Dita. NPM 2115500051. 2019. *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018.( Study kasus Divisi Perencanaan Program dan Data)*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Dra.Hj Sri Sutjiatmi, M.Si dan Pembimbing II : Agus Setio Widodo.S.IP M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal dalam mengolah dan menyajikan data, ingin menggambarkan kendala yang dihadapi Divisi Perencanaan Program dan Data KPU kabupaten Tegal dalam mengolah dan menyajikan data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018. ( Study kasus Divisi Perencanaan Program dan Data). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja menurut Agus Dwiyanto (2006:50-51).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemilukada Serentak tahun 2018. (study kasus Divisi Perencanaan Program dan Data) berjalan dengan baik tetapi ada aspek yang harus diperbaiki. Selain itu juga ada beberapa kendala a) kurangnya SDM dalam Divisi Perencanaan Program dan Data b) kendala jaringan IT dari pihak eksternal yaitu koneksi bisa terputus sendiri c) kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat pemutakhiran.

**Kata Kunci** : Kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data, Pemilukada serentak.



## ABSTRACT

Pratiwi, Dita. NPM 2115500051. 2019. *Performance of the General Election Commission of Tegal Regency in the Implementation of Simultaneous Election in 2018. (Study case of Program and Data Planning Division)*. Thesis, Government Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Dra. Hj Sri Sutjiatmi, M.Sc and Supervisor II: Agus Setio Widodo.S.IP M.Sc

This study aims to describe the performance of the Program Planning Division and Tegal Regency KPU Data in processing and presenting data, wanting to illustrate the obstacles faced by the Program Planning and Data Division of Tegal Regency KPU in processing and presenting data.

Want topar qualitative descriptive is used in this research, namely the type of research that seeks to describe clearly the Performance of the General Election Commission of Tegal Regency in the Implementation of Simultaneous Election in 2018. (Study case of Program and Data Planning Division). The theory used in this study is performance theory according to Agus Dwiyanto (2006: 50-51).

That is the type that tries to describe clearly Performance of the General Election Commission of Tegal Regency in the Implementation of Simultaneous Election in 2018. (case study of the Program and Data Planning Division) runs well but there are aspects that must be corrected. In addition there are also several obstacles a) lack of human resources in the Program Planning and Data Division b) the constraints of IT networks from external parties, namely connection can be disconnected itself c) lack of public knowledge of the benefits of updating.

**Keywords:** Performance of Program Planning and Data Division, Simultaneous General Election.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT pendengar semua do'a, rumah semua harapan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2018. (study kasus Divisi Perencanaan Program dan Data)”

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.
- b. Dr. Nuridin, SH. MH., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian.
- c. Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
- d. Dra.Hj Sri Sutjiatmi, dan Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada peneliti demi terselesaikannya skripsi ini.
- e. Dra. Erny Rosyanti M.Si, dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama peneliti melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.

- f. Bapak/Ibu dosen dan staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali ilmu pengetahuan dan membantu terkait dengan administrasi selama peneliti menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
- g. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Tegal, Juli 2019

Tertanda

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b>	
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Pernyataan Penulis .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Persetujuan Skripsi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pengesahan Skripsi.....</b>	<b>iv</b>
<b>Motto .....</b>	<b>v</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Skema .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
I.1    Latar Belakang .....	1
I.2    Rumusan Masalah.....	10
I.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
I.3.1 Tujuan .....	12
I.3.2 Manfaat penelitian .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1    Peneliti Terdahulu .....	15
II.2    Kerangka Teori .....	17
II.2.1 Kinerja .....	17
II.2.1.1 Konsep Kinerja .....	24
II.2.1.2 Faktor-faktor yang menentukan Kinerja .....	27
II.2.2. Pemilukada.....	28
II.2.3 Komisi Pemilihan Umum Daerah .....	33
II.3    Definisi Konsepsional .....	38
II.4    Pokok – Pokok Penelitian .....	40

II.4	Alur Pikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
III.1	Jenis dan Type Penelitian .....	43
III.2	Informan Penelitian .....	45
III.3	Teknik Pengumpulan Data .....	46
III.4	Teknik Analisis Data .....	49
III.5	Sistematika Penulisan .....	52
<b>BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>		
IV.1	Gambaran Umum Kabupaten Tegal .....	54
IV.2	Gambaran Umum KPU Kabupaten Tegal .....	56
IV.2.1	Visi dan Misi KPU Kabupaten Tegal .....	57
IV.2.2	Komisi pemilihan umum Kabupaten Tegal .....	58
IV.2.2.1	Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU Kab. Tegal .....	59
IV.2.2.2	Kepegawaian .....	62
IV.2.2.3	Sarana Prasarana .....	62
IV.2.2.4	Tugas dan Wewenang Divisi Program dan Data .....	63
IV.2.2.4	Kepegawaian Divisi Perencanaan Program dan Data .....	63
IV.2.2.5	Sarana Prasarana Divisi Perencanaan Program dan Data ....	64
IV.2.3	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal .....	65
IV.2.3.2	Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Tegal .....	66
IV.2.3.3	Sarana Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Tegal .....	70
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
V.1	Hasil Wawancara .....	73
V.2	Pembahasan atas Hasil Penelitian .....	132
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
VI.1	Kesimpulan .....	139
VI.2.	Saran .....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		141
<b>LAMPIRAN .....</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 01	Data Pemilih Ganda KPU Kab Tegal Pemilukada Tahun 2018 .....	5
Tabel I. 02	Data Pemilih Meninggal KPU Kab Tegal Pemilukada Tahun 2018 .	7
Tabel I. 03	Data Pemilih Pindah Domisili KPU Pemilukada Th 2018 .....	8
Tabel II. 01	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.....	27
Tabel IV.01	Luas Wilayah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk .....	55
Tabel IV.02	Daftar Kepegawaian Komisioner KPU Kabupaten Tegal .....	62
Tabel IV.03	Sarana Prasarana Komisioner KPU Kabupaten Tegal.....	62
Tabel IV.04	Data Kepegawaian Divisi Perencanaan Program dan Data .....	63
Tabel IV.05	Data Sarana Prasana Divisi prog data .....	64
Tabel IV.06	Data Kepegawaian sekretariat KPU .....	66
Tabel IV.07	Sarana Prasarana Sekretariat KPU Kab Tegal .....	70

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV.01 Peta Kabupaten Tegal .....	55
---	----

## DAFTAR SKEMA

Skema II.01	Alur Pikir .....	42
Skema III.01	Alur Proses Analisis Data .....	51
Skema IV.01	Struktur organisasi KPU Kab. Tegal .....	58
Skema IV.02	Struktur organisasi sekretariat KPU Kab. Tegal .....	65



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Pedoman wawancara .....
Lampiran 2	Surat Riset .....
Lampiran 3	Foto-Foto Wawancara.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* dan *kratein*, *demos* berarti rakyat, sedangkan *kratein* berarti pemerintah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan wujud dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asal Luber sudah ada sejak zaman [Orde Baru](#). Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil.

**Di Indonesia, Pemilihan Umum (pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan [politik](#) tertentu. Jabatan-jabatan**

tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Ramlan (1992:181) Mengartikan Pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Teori demokrasi klasik mengartikan Pemilihan Umum (*general election*) sebagai sebuah "*Transmission of Belt*" sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat.

Keberadaan Pemilihan Umum sebagai proses politik harus didukung oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), salah satu penyelenggara setelah orde roformasi adalah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai 5 divisi yaitu, berdasarkan dasar : surat edaran KPU RI NOMOR : 420/KPU/VIII/TAHUN 2016) yang meliputi 1) divisi hukum, 2) divisi umum, keuangan dan logistik 3) divisi teknis 4) divisi perencanaan program dan data. 5) divisi SDM dan partisipasi masyarakat

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Kinerja berasal dari bahasa *job performance* atau *actual LOLperformance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang atau suatu institusi).

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Amstrong dan Baron 1998:15). Dengan demikian,

kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Kinerja KPU diukur dari enam aspek. Keenam aspek itu adalah kemandirian penyelenggara pemilu, profesionalitas, keadilan dan imparsialitas, kepastian hukum, inklusifitas dan aksesibilitas, keterbukaan dan partisipasi.

Pemilu kepala Daerah langsung pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2004. Pada akhir Tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemilukada serentak dilaksanakan. Akhir 2015 adalah gelombang pertama Pemilukada serentak, yang beberapa diantaranya adalah daerah otonom baru. Pemilukada serentak gelombang kedua diselenggarakan pada Februari 2017, sedangkan gelombang ketiga diselenggarakan pada Juni 2018, dimana Kabupaten Tegal menjadi peserta Pemilukada serentak gelombang 3 ( tiga ) yang diselenggarakan pada bulan juni tahun 2018 dengan peserta yang berjumlah 3 ( tiga ) bakal pasangan calon untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati dan bakal pasangan calon untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berjumlah 2 ( dua ) pasang.

#### Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)

merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan suatu negara.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang *legitimated* di tingkat kabupaten/ kota khususnya Kabupaten Tegal sedang mendapat sorotan

tajam dari publik terkait dengan kapasitasnya selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal periode 2018-2023.

Komisi Pemilihan Umum sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan hajatnya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku yaitu UU No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam rangka mensukseskan Pemilukada 2018 telah melakukan berbagai macam cara untuk menciptakan Pemilukada yang hangat dan ceria, agar masyarakat juga antusias dalam mengikuti proses Pemilukada di Kabupaten Tegal.

Lazimnya dalam banyak perhelatan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), sering terstigma dengan label negatif, sebagai bentuk dari reaksi “publik” atau “kontestan” Pemilukada yang merasa tidak puas atau bahkan merasa di “pecundangi” karena praktek yang dianggap “curang” atau merugikan terkait dengan kinerja KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada tersebut.

Namun sebaliknya, bila proses tahapan Pemilukada berjalan lancar dan berujung pada hasil pemilu yang diterima semua pihak, jarang dianggap sebagai suatu prestasi Kabupaten/ Kota, sehingga terkesan minim apresiasi. Keberhasilan tersebut dalam kacamata publik adalah hal yang seharusnya dilakukan KPU Kabupaten/ Kota dalam rutinitas sebagai penyelenggara pemilu di daerah. Jadi bukan sesuatu yang istimewa bila kinerja KPU Kabupaten/ Kota yang optimal dan profesional sehingga menghasilkan Pemilukada berkualitas.

Salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah data, data adalah fakta yang tersaji baik dalam bentuk angka atau narasi, data yang

akurat adalah salah satu penunjang keberhasilan dalam pemilihan umum. Salah satu devisi yang terkait dengan data yaitu Divisi Perencanaan Program dan data yang mempunyai tugas sebagai Penyusunan Program dan Anggaran, Pemutakhiran data pemilih dan Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan, Pengelolaan jaringan IT, Scan Hasil Pemilu, Pelaporan dan Evaluasi tahapan Pemilu.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pemilihan umum adalah masalah data dan informasi, begitu pula dengan permasalahan yang muncul di KPU Kabupaten Tegal diantaranya masih banyak ditemukannya daftar pemilih ganda baik itu ganda antar TPS, Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, dengan masih adanya daftar pemilih ganda tersebut mengakibatkan adanya ketidakcocokan antara data kependudukan dan daftar pemilih.

**Tabel 1.1**

**Data Pemilih Ganda KPU Kabupaten Tegal dalam Pemilukada Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemilih Ganda</b>
1.	Margasari	699
2.	Bumijawa	689
3.	Bojong	624
4.	Balapulang	949
5.	Pagerbarang	437
6.	Lebaksiu	798
7.	Jatinegara	307
8.	Kedungbanteng	363
9.	Pangkajene	782

10.	Slawi	347
11.	Adiwerna	1054
12.	Talang	576
13.	Dukuhturi	805
14.	Tarub	595
15.	Kramat	958
16.	Suradadi	892
17.	Warureja	601
18.	Dukuhwaru	480
	<b>Jumlah</b>	<b>11.956</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal 2018

Dari tabel yang ada di atas maka dapat di katakan bahwa jumlah daftar pemilih ganda pada pemilukada 2018 masih banyak terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal dengan jumlah keseluruhan 11.956, dan yang terbanyak terjadi DPT ganda yaitu di Kecamatan Adiwerna dengan jumlah 1054 jiwa dan paling sedikit terdapat di kecamatan jatinegara dengan jumlah 307 jiwa

terbanyak terjadi DPT ganda yaitu di Kecamatan Adiwerna dengan jumlah 1054 jiwa dan paling sedikit terdapat di kecamatan jatinegara dengan jumlah 307 jiwa

**Tabel 1.2**

**Data Pemilih Meninggal KPU Kabupaten Tegal dalam Pemilukada Tahun  
2018**

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Meninggal
1.	Margasari	3.462

2.	Bumijawa	2.543
3.	Bojong	1.871
4.	Balapulang	2.640
5.	Pagerbarang	1.963
6.	Lebaksiu	3.205
7.	Jatinegara	1.937
8.	Kedungbanteng	1.327
9.	Pangkajene	3.351
10.	Slawi	2.185
11.	Adiwerna	3.773
12.	Talang	2.946
13.	Dukuhturi	3.341
14.	Tarub	1.161
15.	Kramat	3.178
16.	Suradadi	2.804
17.	Warureja	2.009
18.	Dukuhwaru	1.684
	<b>Jumlah</b>	<b>46.477</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal 2018

Dari tabel yang ada di atas maka dapat dikatakan bahwa jumlah daftar pemilih yang sudah meninggal tapi terdaftar sebagai DPT pada pemilu pada 2018 juga masih banyak terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal dengan jumlah keseluruhan 46.477, dan yang terbanyak terjadi yaitu di



Kecamatan Adiwerna dengan jumlah 3.773 jiwa dan paling sedikit terdapat di kecamatan tarub dengan jumlah 1.161 jiwa.

**Tabel 1.3**

**Data Pemilih Pindah Domisili KPU Kabupaten Tegal dalam Pemilu  
Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemilih Pindah Domisili</b>
1.	Margasari	4.344
2.	Bumijawa	4.732
3.	Bojong	2.969
4.	Balapulang	5.693
5.	Pagerbarang	2.874
6.	Lebaksiu	6.089
7.	Jatinegara	2.467
8.	Kedungbanteng	2.593
9.	Pangkah	5.727
10.	Slawi	3.923
11.	Adiwerna	7.976
12.	Talang	5.709
13.	Dukuhturi	7.013
14.	Tarub	3.666
15.	Kramat	4.584
16.	Suradadi	4.153

17.	Warureja	3.062
18.	Dukuhwaru	4.036
	<b>Jumlah</b>	<b>81.610</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal 2018

Selain terdapat DPT ganda dan pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar di DPT , fenomena yang terjadi dilapangan yaitu masih adanya data orang yang pindah domisili tetapi masih terdaftar dalam DPT pada Pemilukada di Kabupaten Tegal tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan 81.610, dan yang terbanyak terjadi yaitu di Kecamatan Adiwerna dengan jumlah 7.976 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tarub dengan jumlah 2.467jiwa.

Dimana dari ketiga tabel di atas Kecamatan Adiwerna merupakan kecamatan yang memiliki permasalahan yang paling banyak dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal pada Pemilukada tahun 2018.

Permasalahan seperti ini sering kali terjadi karena adanya ketidak cocokan data pada saat pencoklitan (pencocokan dan penelitian) dengan DPT, ini menunjukkan bahwa kinerja divisi perencanaan program dan data kurang maksimal, dampak permasalahan data biasanya akan mendorong opini publik bahwa terjadi adanya manipulasi data atau semacamnya. Oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Tegal khususnya di divisi perencanaan program dan data.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK**

## **TAHUN 2018 ”. (STUDY KASUS DIVISI PERENCANAAN PROGRAM DAN DATA)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Pariata Westra ( 1981 : 263 ) bahwa “ Suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil ”. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi ( 1973 : 3 ) “ Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa”.

Pemilukada langsung merupakan salah satu bentuk reformasi, dimana kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang ada didaerah mereka, terutama rakyat yang memiliki hak pilihnya sesuai dengan kedaulatan dan azas yang ada di pembukaan UUD 1945.

Komisi Pemilihan Umum Merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Divisi perencanaan program dan data merupakan salah satu unsur penting dalam suksesnya Pemilukada, maka dari itu divisi tersebut harus mempunyai kinerja yang tinggi dengan di tunjukan penyajian data yang akurat. Terkait tugas Divisi Perencanaan program dan data yaitu : Penyusunan Program dan Anggaran, Pemutakhiran data pemilihan, Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan

Pemilihan, Pengelolaan jaringan IT, Scan Hasil Pemilu, Pelaporan dan Evaluasi tahapan Pemilu.

Menurut Agus Riewanto (dalam Pilkada langsung 225-226) untuk mewujudkan kinerja yang baik harus adanya dua syarat utama yang di penuhi : pertama, diperlukan integritas pribadi setiap anggota KPUD. Kedua, perlunya pemberdayaan institusi KPUD secara maksimal berdasarkan pada Undang-Undang.

Data merupakan salah satu unsur penting bagi Pemilihan umum, data adalah fakta yang tersaji dalam bentuk angka atau narasi. Data yang akurat akan menunjang keberhasilan dalam Pemilihan Umum.

Untuk dapat melaksanakan Pemilukada dengan baik jumlah data pemilih tetap haruslah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, namun pada kenyataan yang ada di lapangan jumlah data pemilih masih ada saja permasalahan terutama di bagian data yaitu adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal tetapi masih masuk dalam DPT, dan pemilih yang sudah pindah domisili tetapi masih masuk dalam DPT yang terjadi pada Pemilukada di Kabupaten Tegal tahun 2018.

Secara sederhana, masalah dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana adanya ketidaksesuaian kehendak dan kenyataan. Masalah dapat di definisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu mendapat pemecahan sehingga manusia tergerak untuk bisa memecahkannya.

Berdasarkan pengertian masalah tersebut di atas, peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018?
- b) Apa kendala yang dihadapi Divisi Perencanaan Program dan Data Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018?
- c) Apa solusi yang dilakukan Divisi Perencanaan Program dan Data Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian adalah :

1. Menggambarkan kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018.
2. Menggambarkan kendala yang dihadapi Divisi Perencanaan Program dan Data KPU kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018.
3. Menggambarkan solusi yang dilakukan Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pemilihan umum bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1) Bagi peneliti

Bagi peneliti sebagai pengetahuan dan wawasan dibidang Pemerintah serta sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mengelola data penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan.

2) Bagi KPU

Penelitian ini berguna untuk tolak ukur dalam meningkatkan kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data dan mengetahui langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga KPU Kabupaten tegal di masa mendatang.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk sumbangan pemikiran dalam pembuatan kebijakan di bidang politik pemerintahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang di angkat untuk memungkinkan pembaca meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian.

#### **II.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang sekiranya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan.

Rasidar, SE, M.Si, Deni darmawan, SE. 2013, Kinerja KPUD Dalam Penyelenggaraan Pilkada Walikota Pontianak.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengetahui kinerja KPUD dalam penyelenggaraan pilkada walikota pontianak menurut pandangan publik terhadap kebijakan penyelenggaraan pilkada, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja kpu selama melakukan pelaksanaan pemilkukada.

Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan banyak memanfaatkan prinsip kinerja yang lebih mengedepankan deskripsi peristiwa/fenomena dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Sumber datanya didapatkan dari orang-orang yang ada di sekretariata kpud kota pontianak

Hasil dari penelitian di lapangan menunjukan bahwa kinerja KPUD dalam penyelenggaraan Pemilukada reaksi publik cukup positif dan mengindikasikan masyarakat sudah semakin matang dalam berdemokrasi adapun reaksi negatif yang muncul tidak terlalu ekstrim namun masih pada batas-batas normal yang juga mencerminkan bahwa masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu dan situasi yang tidak jelas.

Anuspati, Martoyo, dan Sukamto, 2013, Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengetahui kinerja aparatur KPUD Kabupaten Kubu Raya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja KPUD Kubu Raya dalam menyiapkan pemilukada di kubu raya dengan melihat aspek dari kinerja aparatur yang ada di kpud untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal.

Metode yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif dengan banyak memanfaatkan prinsip kinerja yang lebih mengedepankan deskripsi peristiwa/fenomena dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Sumber datanya didapatkan dari orang-orang yang ada di sekretariata KPUD Kabupaten Kubu Raya.



Hasil penelitian ini menjelaskan Kinerja aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: Kualitas kinerja aparatur belum optimal, Kinerja aparatur dari aspek kuantitas kinerja aparatur menunjukkan bahwa jumlah tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan belum mencapai hasil sesuai dengan harapan, Kinerja aparatur dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan, terlihat belum maksimal. Di samping itu kurang adanya perhatian dari pimpinan terhadap pemberian insentif kepada aparatur yang bekerja di luar jam kantor. -Sumber Daya manusia, temuan menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang ada secara kualitatif belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal tersebut disebabkan belum memadai dari segi latar belakang pengalaman organisasi dan ketrampilan sehingga membuat kinerja aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan visi dan misi KPU.

## **II.2 Kerangka Teori**

### **II.2.1 Kinerja**

Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata Inggris "*performance*" Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, *performance the desire result of behavior* (kinerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku). Maksudnya adalah bahawa kinerja pegawai/karyawan merupakan hasil untuk kerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Kinerja pegawai menurut Cascio dan Aguinis, *as obsevable yhings people do that are relevant for the goals of the organization* yaitu sebagai orang yang dapat diamati hal-hal yang relevan untuk tujuan organisasi.

Menurut Bernadin dan Russel (1993:378) dalam Rucky mendefinisikan tentang performance sebagai berikut, kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Pendapat diatas menitik beratkan bahwa kinerja seorang pegawai/karyawan adalah hasil atau keluaran (*outcomes*) dari sebuah pekerjaan yang ditugaskan dalam suatu organisasi/institusi.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Amstrong dan Baron 1998:15). Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut . kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Kinerja berasal dari bahasa *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang atau suatu institusi).

Menurut Prawirosentono (2000:1) mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenangnya dan tanggung jawabnya masingmasing untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Kinerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja

dengan baik, berprestasi, bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu (Mahmudi,2005;22)

Nasucha, mengemukakan bahwa kinerja adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhan secara efektif (pasolong,2010;177)

Selain itu menurut Amstrong dan Baron, kinerja disebut juga sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Wibowo,20018;7)

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja seseorang atau instansi. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja instansi (*coorporate performance*) terdapat hubungan yang erat, dengan perkataan lain

bila kinerja karyawan (*individual performance*) baik maka kemungkinan besar kinerja instansi (*coorporate performance*) juga baik.

kinerja menurut Taliziduhu Ndraha (1999:41) kinerja berasal dari kata kerja yang berarti kombinasi antara energi manusiawi dengan kekuatan mesin dan merupakan konsep yang bersifat abstrak dan sulit diukur.

Pendapat ini diperjelas oleh Simamora (1995 : 37) yang mengatakan bahwa kinerja adalah tingkat sampai dimana karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.

Istilah kinerja dalam bahasa inggris "*performance*". Menurut The Scibner-Bantam English Dictionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada tahun 1979, performance berasal dari akar kata "to perform" yang mempunyai beberapa arti sebagai berikut :

- a. Melakukan, menjalankan, dan melaksanakan.
- b. Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar.
- c. Menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan.
- d. Menggmbarkannya dengan suara atau alat musik.
- e. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab.
- f. Melakukan suatu kegiatan dalam suatu opermainan.
- g. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Kinerja dapat dikatakan baik sesuai dengan yang diharapkan, apabila sesuai dengan standar atau ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Artinya kinerja aparatur pemerintah pada umumnya

diukur dari kemampuan menegakkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Menurut Henry Simamora (1995:82) kinerja yang baik mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Harus mampu diukur dengan cara yang dipercaya.
2. Harus mampu membedakan individu - individu sesuai dengan kinerjanya.
3. Harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kinerjanya dinilai.

Kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan Penyusunan Program dan Anggaran, Pemutakhiran data pemilih, sisten informasi yang berkaitan dengan Tahapan pemilihan, pengelolaan jaringan IT, scan Hasil Pemilu, pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

Terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan peniaian kinerja yang efektif menurut (Gomes,2003) yaitu:

1. Adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara obyektif dan
2. Adanya obyektifitas dalam proses evaluasi.

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondong Siagian 2002 menjelaskan bahwa bagi inividu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada giliranya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitanya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan,

rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya manusia.

Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara obyektif serta didokumentasikan secara sistematis. Dengan demikian, dalam melakukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai harus terdapat interaksi positif dan kontinu antara para pejabat pimpinan dan bagian kepeawaian.

Terdapat beberapa metode dalam mengukur prestasi kerja, sebagaimana diungkapkan oleh Gomes (2003:137-145), yaitu:

1. Metode Tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang termasuk kedalam metode tradisional adalah :
  - a) *Rating scale*. Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungannya, kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya.
  - b) *Employee comparison*. Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara

membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Metode ini terdiri dari : (1) *alternation ranking* : yaitu metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat pegawai dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya (2) *paired comparison* : yaitu metode penilaian dengan cara seorang pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya, sehingga terdapat berbagai alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan untuk pegawai yang relatif sedikit (3) *porced comparison (grading)* : metode ini sama dengan *paired comparison*, tetapi digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif banyak.

- c) *Check list*. Metode ini hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia
- d) *Freeform essay*. Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang atau karyawan atau pegawai yang akan dinilainya
- e) *Cristal incindent*. Dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahanya sehari-hari yang kemudian dimasukan kedalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam

ketegori tingkah laku bawahanya. Misalnya mengenai inisiatif, kerjasama dan keselamatan.

2. Metode modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi kerja. Yang termasuk kedalam metode ini adalah : *asesment centre*, *Management By Objective (MBO=MBS)*, dan *human asset accounting*.

- *Assesment centre*. Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus. Tim penilai khusus ini bisa dari luar, dari dalam, maupun kombinasi dari luar dan dari dalam.
- *Management by obective (MBO=MBS)*. Dalam metode ini pegawai langsung diikutsertakan dalam perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam menentukan sasarnya masing-mmasing yang ditekankan pada pencapaian sasaran instansi
- *Human asset accounting*. Dalam metode ini faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka panjang seingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan instansi.

#### **II.2.1.1. Konsep Kinerja**

*Bernardin dan Russel* dalam Ruky (2002:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut: “ performance is defined as the record of outcomes



produced on a specified job function or activity during time period”. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu.

Menurut *Gibson*, dkk (2003:355), *job performance* adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya.

Menurut *Ilyas* (1999:99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil didalam organisasi.

Pengukuran kinerja pegawai penting dilakukan oleh instansi pemerintahan baik itu instansi pemerintah pusat sampai ke daerah. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan, hambatan dan dorongan, atau berbagai faktor sukses bagi kinerja pegawai serta institusi maka terbukalah jalan menuju profesionalisasi, yaitu memperbaiki kesalahan - kesalahan yang dilakukan selama ini. Terdapat berbagai teori mengenai indikator kinerja pegawai. Salah satunya indikator kinerja pegawai menurut *Muhammad* (2009:195) mengemukakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu:

- a. Pemahaman atas tupoksi, dalam menjalankan tupoksi, bawahan harus terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengajarkan tugas sesuai apa yang menjadi tanggungjawabnya.

- b. Inovasi, memiliki inovasi yang positif menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan.
- c. Keakuratan kerja, dalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada.
- d. Kerjasama, kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain.

Menurut *Agus Dwiyanto* dalam Pasalong (2006:50-51) indikator kinerja pegawai meliputi:

1. Produktivitas kerja yang memiliki ukuran diantaranya:
  - a) Sikap pegawai, dimana dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien.
  - b) Kemanapun dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya.
  - c) Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas.
2. Kualitas layanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas.
3. Responsivitas adalah kemampun aparat untuk menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta

mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
5. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Pemaparan dari beberapa teori di atas dan membandingkan kondisi yang ada di lapangan maka penelitian ini akan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto dalam Pasalong (2006:50-51) untuk mengukur kinerja pegawai, yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terkandung dalam indikator ini dianggap mampu menggambarkan kinerja KPU Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2018. (Study kasus divisi perencanaan program dan data)

### **II.2.2. Pemilu Serentak**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga soal, yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl dikatakan adalah untuk menciptakan *local accountability, political equity dan local responsiveness* (Suara KPU, edisi II-2015: 4), khususnya untuk melihat sejauh mana rakyat di daerah bisa menentukan sendiri nasib, pemimpin dan pemerintahannya. Pemilu Serentak

berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agar terimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapi juga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.

Pemilukada serentak 2018 akan menjadi pemilukada serentak gelombang ketiga yang memilih kepala daerah di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota. Sebelumnya, pada 2017 sudah berlangsung pemilihan di 101 daerah dan pada 2015 berlangsung di 269 daerah. Tiga provinsi dengan jumlah penduduk "gemuk", yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, juga akan memilih kepala daerah pada pilkada gelombang ketiga ini.

Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) merupakan konsekuensi pembagian wilayah Indonesia ke dalam wilayah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah yang dikenal saat ini yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Provinsi dan kabupaten/kota memiliki

pemerintahan daerah tersendiri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah seperti disebutkan diatas diatur oleh suatu pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya berasal dari partai politik. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya, yang paling menonjol di sini adalah pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya rakyatlah yang secara langsung memilih siapa Kepala Daerah. Hal ini tentu saja merupakan terobosan baru dalam menafsirkan demokrasi yang ditentukan oleh konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjabarkan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 dengan menentukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. oleh

karena itu jika UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini memang merujuk ke Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 itu. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan demikian Kepala Daerah yang terpilih benar-benar representative. Aspirasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung itu.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tetap berjalan sampai saat ini. Diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan diganti menjadi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan secara langsung tetap dilakukan. Dasar hukum untuk Pemilihan Kepala Daerah saat ini adalah Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbedaan yang membuat perubahan besar dalam sejarah pemilihan kepala daerah yaitu pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan ; “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya pada Pilkada

serentak, pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai waktu yang telah ditetapkan KPU.

Pelaksanaan secara serentak ini diharapkan anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada menjadi lebih minim. Maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2015 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan serta dengan benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidensial.

### **II.2.3 Komisi Pemilihan Umum Daerah**

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.



Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga yang berwenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, disetiap Provinsi, Kota/ Kabupaten.

Tugas dan wewenang KPUD berdasarkan Undang-undang no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu pada paragraf 3 pasal 10 ayat (3). Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Bupati/ Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan

- pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam PKPU No.6 tahun 2008 pasal 17 KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
2. Memberikan dukungan teknis administratif

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemilu
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan putusan KPU Kabupaten/ Kota
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/ Kota
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/ Kota
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/ Kota
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/ Kota
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota

5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/ Kota
6. Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten/ Kota
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/ Kota
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang dan jasa keperluan Pemilu Kabupaten/ Kota
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/ Kota
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/ Kota

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 KPU Kabupaten/ Kota mempunyai wewenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
2. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/ Kota
4. Memberikan pelayanan administrasi, ketatusahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### **II.3. Definisi Konsep**

Menurut Robert K Norton yang dikutip oleh “Koentjarningrat” (1981:31) mengatakan bahwa “Definisi Konsepsional merupakan definisi yang perlu diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris”

Dengan demikian definisi konsepsional yaitu menggambarkan suatu abstrak dari hal – hal yang perlu di amati sehingga akan mempermudah penelaahan dan penjernihan masalah-masalah agar mudah di mengerti, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas, maka konsep dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang berupa definisi yang mana definisi tersebut akan menggambarkan secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian.

Konsep mengenai kinerja KPUD dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tegal 2018 Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kinerja adalah pencapaian hasil kerja seseorang atau instansi. Dengan demikian kinerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja instansi (*coorporate performance*) terdapat hubungan yang erat, dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (*individual performance*) baik maka kemungkinan besar kinerja instansi (*coorporate performance*) juga baik.
- b. Divisi Perencanaan Program dan Data merupakan bagian dari KPUD yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan Penyusunan

Program dan Anggaran, Pemutakhiran data pemilih, sisten informasi yang berkaitan dengan Tahapan pemilihan, pengelolaan jaringan IT, scan Hasil Pemilu, pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

- c. Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Kinerja Divisi perencanaan program dan data. Merupakan suatu pencapaian divisi perencanaan program dan data yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan: Penyusunan Program dan Anggaran, Pemutakhiran data pemilih, sisten informasi yang berkaitan dengan Tahapan pemilihan, pengelolaan jaringan IT, scan Hasil Pemilu, pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

#### **II.2.5. Pokok-Pokok Penelitian**

Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari konsep-konsep yang telah diuraikan di atas. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur dengan indikator-indikatornya.

Berdasarkan pengertian pokok-pokok penelitian di atas, peneliti ajukan beberapa pokok-pokok penelitian sebagai berikut:

1. Kinerja divisi perencanaan program dan data dengan indikator :
  - a. Produktivitas dengan unit analisis :
    - 1) sikap pegawai

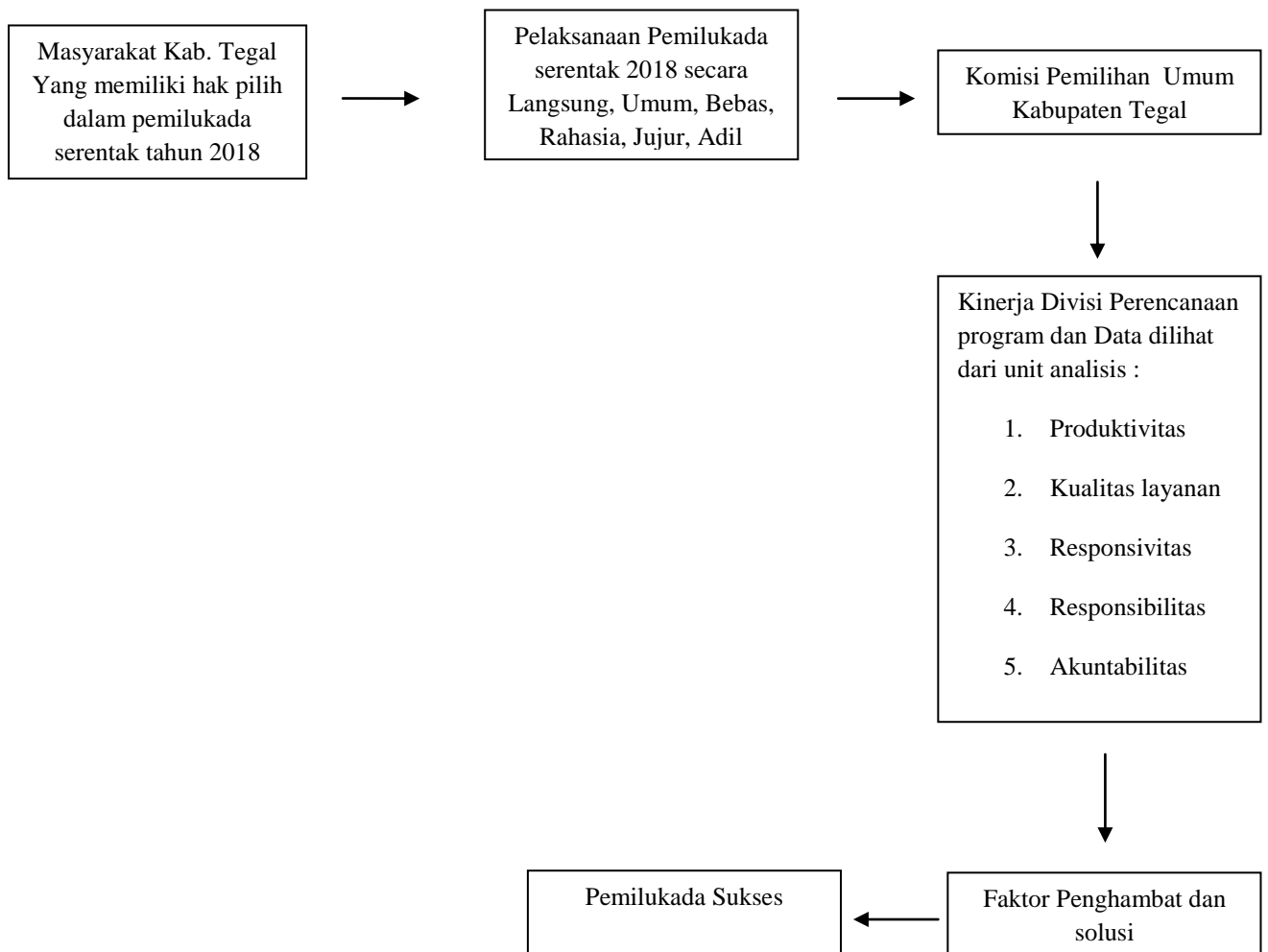
- 2) kemampuan
- 3) semangat kerja
- b. Kualitas Layanan dengan unit analisis :
  - 1) kesalahan
  - 2) kerusakan
  - 3) dan kecermatan dalam melaksanakan tugas
- c. Responsivitas dengan unit analisis :
  - 1) menggali kebutuhan masyarakat
  - 2) menyusun agenda dan prioritas pelayanan
- d. Responsibilitas
- e. Akuntabilitas

#### **II.4. Alur Pikir**

Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang memuat langkah-langkah atau proses-proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. Peranan peneliti sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian agar berjalan dengan sistematis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alur pikir yang akan dijelaskan melalui bagan dibawah ini:





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi, 2006:150). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:3) disebutkan bahwa secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data.

Surakhmad (2008:131) mengungkapkan bahwa metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, cara utama tersebut disesuaikan dengan situasi penelitian. Penentuan metode penelitian ini sangat vital, karena menyangkut pemecahan masalah yang berdampak pada pengambilan kesimpulan. Dengan menentukan metode penelitian yang tepat, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat terpecahkan, kesimpulan yang diambil tepat dan akurat.

#### **III.1. Tipe Penelitian**

Sugiyono (2006), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya, Sugiyono (2006) mengelompokkan type penelitian menjadi :

##### **a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif)**

Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai

gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis.

b. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Dalam bukunya Prof. Sugiono, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

c. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

d. Penelitian Asosiatif atau hubungan

Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan ke empat type penelitian diatas, type penelitian yang digunakan peneliti adalah type penelitian deskriptif, artinya peneliti ingin mendeskripsikan tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2018. (Study Kasus Divisi Perencanaan Program dan Data)

## **Jenis dan Sumber Data**

### **III.2.1 Jenis Data**

Adapun jenis data pada penelitian ini adalah

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### III.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Informan : Komisioner KPU Kabupaten Tegal bagian Divisi Perencanaan Program dan Data, Sekretaris KPU Kabupaten Tegal, Ka Subag Perencanaan Program dan Data, Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data, Anggota/ staff Bawaslu Kabupaten Tegal serta, Masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.
2. Kantor KPU sebagai instansi yang menyediakan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### III.2. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2001:91) informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Informan merupakan suatu sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan.

Informan dalam penelitian ini adalah :

Komisioner KPU Kabupaten Tegal bagian Divisi Perencanaan Program dan Data, Sekretaris KPU Kabupaten Tegal, Ka Subag Perencanaan Program dan Data, Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data, Anggota/ staff Bawaslu Kabupaten Tegal, Masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

### **III.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, menurut Nasution (1988) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sugiyono, 2011:226) mengemukakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Marshall, 1995:226) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara langsung di lapangan tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Tegal Tahun 2018. (Study Kasus Divisi Perencanaan Program dan Data)

2. Metode Interview (Wawancara), Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002:231) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung dimaksudkan mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui responde. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan topik penelitian untuk memperoleh data primer dari obyek penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip Lexi J.Moleong (2007:186), antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari Komisioner KPU Divisi Perencanaan Program dan Data, Ka Su bagian perencanaan program dan data, Anggota/ staff

perencanaan program dan data, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal, dan Masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

3. Kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan membaca buku – buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
4. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal dokumen (Bogdan, 240) menyatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredible/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.

#### **III.4. Teknik dan Analisis Data**

Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara



interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenu. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan / Verifikasi.

Adapun penjelasan tentang model interaktif yang di kembangkan Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2011) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data adalah dimana data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian.
2. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

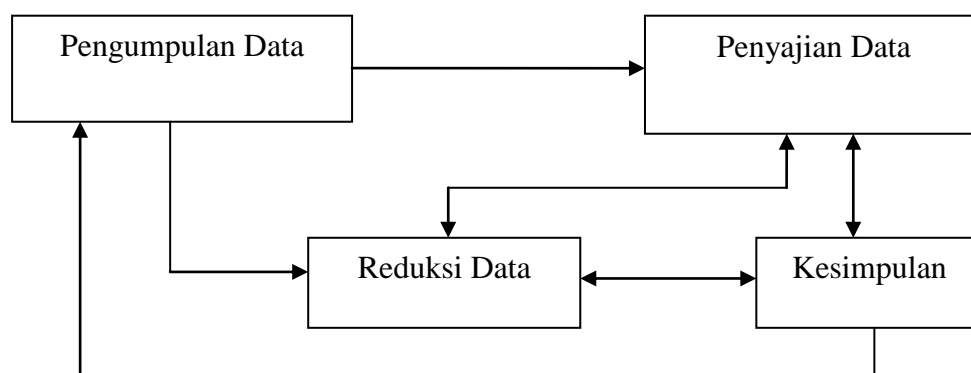
3. Penyajian Data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, dan proposisi. Menurut Miles dan Huberman (2011: 252) mengemukakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, Burhan (2003:56) sebagai berikut:

Skema 3.01 Proses Analisis Data



Pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi berinteraksi satu sama lain, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, peneliti kemudian memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

#### **IV.1 Deskripsi Kabupaten Tegal**

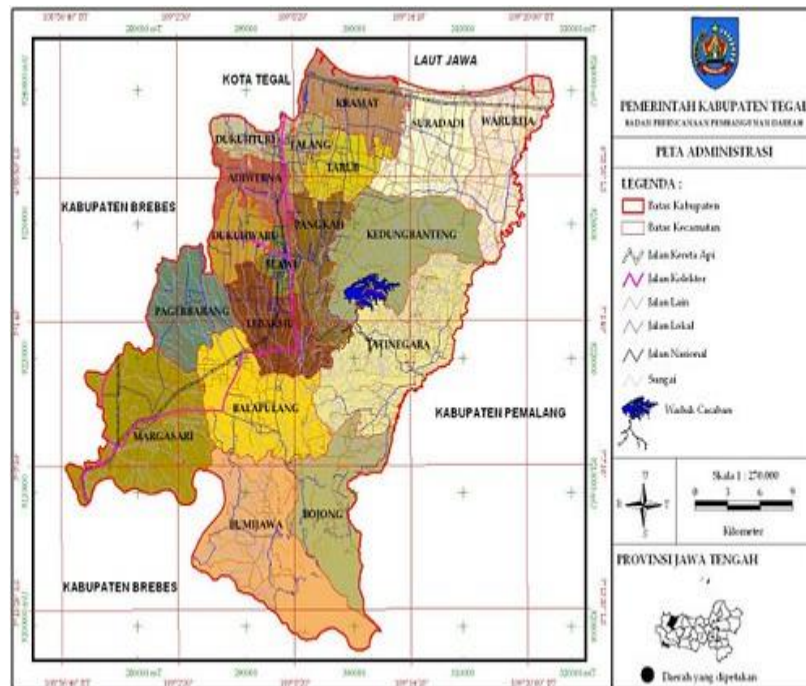
##### **IV.1.1 Letak Geografis Kabupaten Tegal**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6" s/d 109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 878,79 km persegi, yang terbagi dalam 18 kecamatan dengan 281 desa dan 6 kelurahan Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah Utara: Kota Tegal dan Laut Jawa

**Gambar IV.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Tegal**



Sumber: [http://bappeda.tegalkab.go.id/?page\\_id=14](http://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14)

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu :

1. Daerah pantai/pesisir meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja (3 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan)
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah (10 kecamatan dengan 159 desa/kelurahan)

3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng (5 kecamatan dengan 85 desa)

Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Tegal adalah 1.424.891, dengan Kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2015 mencapai 1.621 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Adiwerna dengan kepadatan sebesar 6.054 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Kedungbanteng yaitu sebesar 461 jiwa/km<sup>2</sup> secara rinci dapat dilihat pada Tabel.

**Tabel IV.1**

**Luas Wilayah Kabupaten Tegal**

**Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan 2017 (Ha)**

No.	Kecamatan	Sawah *)	Bukan Sawah	Jumlah	Sawah (%)	Bukan Sawah (%)
1	Margasari	3.489	5.194	8.683	9,01	10,57
2	Bumijawa	2.280	6.576	8.856	5,89	13,38
3	Bojong	2.245	3.607	5.852	5,80	7,34
4	Balapulang	3.152	4.339	7.491	8,14	8,83
5	Pagerbarang	2.752	1.548	4.300	7,10	3,15
6	Lebaksiu	2.719	1.376	4.095	7,02	2,80
7	Jatinegara	2.111	5.851	7.962	5,45	11,9
8	Kedungbanteng	1.379	7.383	8.762	3,56	15,02
9	Pangkah	1.448	2.103	3.551	3,74	4,28
10	Slawi	375	1.014	1.389	0,97	2,06
11	Dukuhwaru	1.836	794	2.630	4,74	1,62
12	Adiwerna	989	1.397	2.386	2,55	2,84
13	Dukuhturi	624	1.124	1.748	1,61	2,29
14	Talang	1.202	637	1.839	3,10	1,30
15	Tarub	1.742	940	2.682	4,50	1,91
16	Kramat	2.157	1.692	3.849	5,57	3,44
17	Suradadi	4.131	1.442	5.573	10,66	2,93
18	Warureja	4.104	2.127	6.231	10,60	4,33
	Jumlah	38.735	49.144	87.879	100	100

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018

Dari tabel IV.1 dapat diketahui keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tegal menurut kecamatan dan jenis penggunaan lahan tahun 2017 (ha), mencakup luas sawah maupun bukan sawah yakni 87.879 (ha). Luas keseluruhan lahan sawah adalah 38.735 (ha) dan luas keseluruhan lahan bukan sawah adalah 49.144 (ha). Dan dari 18 kecamatan, kecamatan Bumijawa yang memiliki lahan terluas yakni 5,89 % sawah (2.280 ha) dan 13,38 % bukan sawah (6.576 ha) dimana total luasnya adalah 8.856 (ha).

## **IV.2 Deskripsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

### **IV.2.1 Letak Geografis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

Kantor KPU Kabupaten Tegal terletak di lingkungan pusat Pemerintahan Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah timur alun-alun Pemerintahan Kabupaten Tegal dan bersebelahan dengan Kantor Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Tegal. KPU Kabupaten Tegal menempati Gedung ex Kantor Dinas Sosial Cabang Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, dimana saat ini sedang dilakukan pengembangan fasilitas gedung berupa pembangunan Musholla, untuk lebih menunjang kegiatan ibadah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal.

KPU Kabupaten Tegal dipimpin oleh seorang Ketua Nurokhman, S.Ag. M.S.I. Dalam keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Tegal membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tegal terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan *website* KPU Kabupaten Tegal dengan alamat [www.kab-tegal.kpu.go.id](http://www.kab-tegal.kpu.go.id).

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Tegal berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kabupaten Tegal terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

#### **IV.2.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

##### **A. Visi**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **B. Misi**

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil



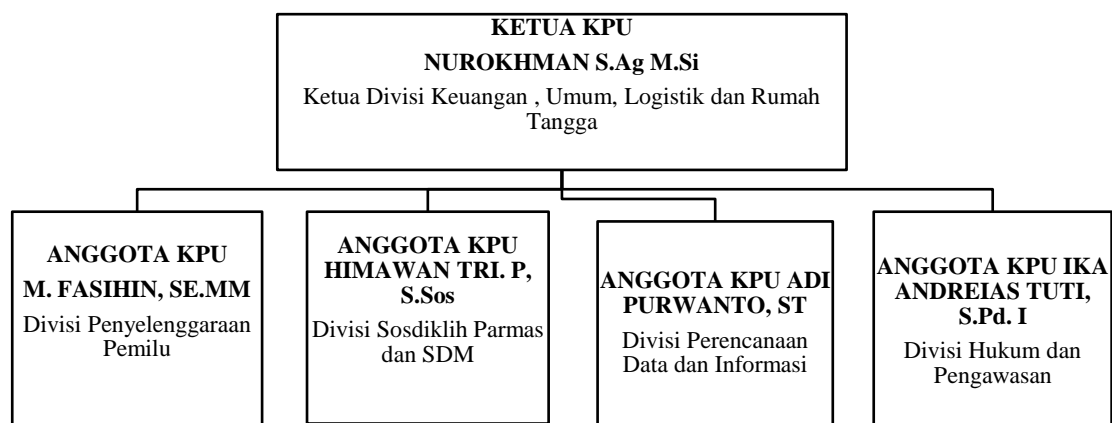
Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

#### IV.2.3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

**Bagan IV.1**

##### **Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**



Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

Keterangan Nama Perangkat (Bagan IV.1):

1. Ketua KPU Kabupaten Tegal : Nurokhman S.Ag M.Si
2. Divisi Penyelenggaraan Pemilu : M. Fasihin, SE.MM
3. Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM : Himawan Tri Pratiwi S.Sos
4. Divisi Perencanaan dan Informasi : Adi Purwanto, ST
5. Divisi Hukum dan Pengawasan : Ika Andreias Ruti, S.Pd.I

#### **IV.2.4 Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU Kabupaten Tegal**

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati dan walikota
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel IV.2**

**Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

Berikut pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal:

URAIAN	JUMLAH	Persentase (%)
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN		
SEKOLAH DASAR	-	-
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	-	-
SEKOLAH MENENGAH ATAS	-	-
DIPLOMA I	-	-
DIPLOMA II	-	-
DIPLOMA III	-	-
STRATA I	3	60
STRATA II	2	40
STRATA III	-	
MENURUT JENIS KELAMIN		
LAKI-LAKI	5	100
PEREMPUAN	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

Dari Tabel IV. dapat diketahui pada tahun 2018 Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal berjumlah 5 orang. Jika dilihat dari tingkat

pendidikan maka jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan tamat Strata II berjumlah 2 (40%) orang. Sedangkan untuk latar belakang tamat pendidikan Strata 1 berjumlah 3 (60%).

#### **IV.2.5 Sarana Prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

Dalam pelaksanaan tugas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tidak terlepas dari sarana prasarana penunjang kinerja. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan jumlah yang tersedia berdasarkan hasil wawancara antara lain :

**Tabel IV.3**  
**Sarana dan Prasarana Komisioner penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi / Keadaan	
			Baik	Rusak
	1	2	3	4
1.	Mobil	5	5	-
2.	Sepeda Motor	-	-	-
3.	Lemari Besi	5	5	-
4.	Lemari kayu	1	1	-
5.	White Board Electronic	1	1	-
6.	Meja Kerja Kayu	6	6	-
7.	Kursi Besi/ Metal	5	5	-
8.	Meja Rapat	1	1	-
9.	AC	2	2	-
10.	Kulkas	1	1	-
11.	Laptop	5	5	-
12.	Printer	1	1	-

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

Berdasarkan tabel IV.3 diatas sarana prasarana dalam menunjang kinerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu pada serentak tahun 2018, semuanya dalam keadaan baik.

#### **IV.2.6 Tugas dan Wewenang Divisi Perencanaan Program dan Data**

Tugas dan wewenang Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur meliputi:

1. Penyusunan Program dan Anggaran,
2. Pemutakhiran data pemilih dan Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan
3. Pengelolaan jaringan IT
4. Scan Hasil Pemilu
5. Pelaporan dan Evaluasi tahapan Pemilu.

#### **IV.2.7 Kepegawaian Divisi Perencanaan Program dan Data**

Berikut pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal:

**Tabel IV.4**  
**Data Pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal**

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Persentase (%)</b>
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN		
SEKOLAH DASAR	-	-



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	-	-
SEKOLAH MENENGAH ATAS	1	14,3
DIPLOMA I	-	-
DIPLOMA II	-	-
DIPLOMA III	-	-
STRATA I	5	71,4
STRATA II	1	14,3
STRATA III	-	-
MENURUT JENIS KELAMIN		
LAKI-LAKI	7	100
PEREMPUAN	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kaupaten Tegal

Dari Tabel IV. dapat diketahui pada tahun 2018 Jumlah anggota Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 7 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan tamat SMA sebanyak 1 (14,3%) orang. Sedangkan untuk latar belakang tamat pendidikan Diploma tidak ada, latar belakang tamat pendidikan S1 berjumlah 5 (71,4%) orang dan S2 berjumlah 1 (14,3%) orang.

#### IV.2.8 Sarana dan Prasarana Divisi Perencanaan Program dan Data

**Tabel IV.5**

**Data Sarana Prasarana Divisi Perencanaan Program dan Data KPU  
Kabupaten Tegal**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi / Keadaan

			Baik	Rusak
	1	2	3	4
1.	Lemari kayu	1	-	-
2.	Meja kerja kayu	7	7	-
3.	Kursi besi/ metal	8	7	1
4.	Meja rapat	1	1	-
5.	AC	2	2	-
6.	Komputer	4	4	-
7.	Leptop	4	4	-
8.	Printer	3	3	-
9.	Televisi	1	1	-
10.	DVD	1	1	-

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

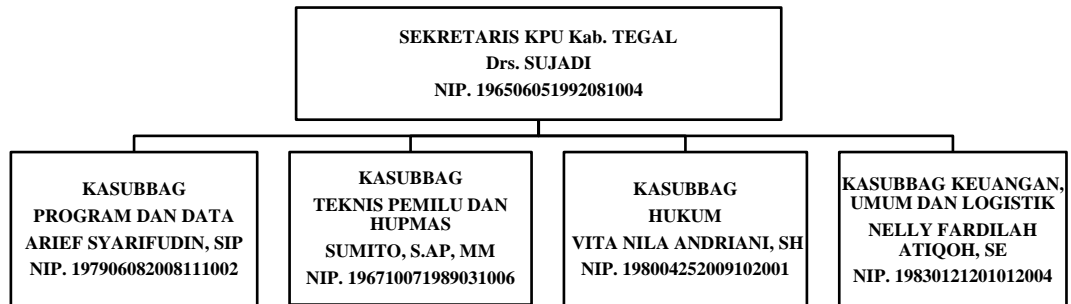
Berdasarkan tabel IV.5 diatas sarana dan prasarana Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam menunjang kinerja, semuanya dalam keadaan baik hanya satu yang dalam keadaan rusak yaitu kursi besi.

#### **IV.2.9 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

#### **Bagan IV.2**

## Struktur Organisasi

### Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal



Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

#### IV.2.10 Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat Kabupaten Tegal

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tegal mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Kabupaten Tegal dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Tegal melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Tegal menerbitkan sejumlah keputusan.

#### **IV.2.11 Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Tegal**

Berikut pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal:

**Tabel IV.6**

#### **Data Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Persentase (%)</b>
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN		
SEKOLAH DASAR	-	-
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	-	-
SEKOLAH MENENGAH ATAS	10	52,6
DIPLOMA I	-	-
DIPLOMA II	-	-
DIPLOMA III	-	-
STRATA I	8	42,1
STRATA II	1	5,2
STRATA III	-	
MENURUT GOLONGAN		
GOLONGAN I	-	
GOLONGAN II	9	47,4
GOLONGAN III	9	47,4
GOLONGAN IV	1	5,2

MENURUT JENIS KELAMIN		
LAKI-LAKI	15	78,9
PEREMPUAN	4	21,05
<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

Dari Tabel IV.6 dapat diketahui pada tahun 2018 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tegal adalah 19 orang. Dengan komposisi pegawai golongan II sebanyak 9 (47,4%) orang, golongan III sebanyak 9 (47,4%) orang dan Golongan IV sebanyak 1 (5,2%) orang.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan tamat SMA sebanyak 10 (52,6%) orang. Sedangkan untuk latar belakang tamat pendidikan Diploma tidak ada, latar belakang tamat pendidikan S1 berjumlah 8 (42,1%) orang dan S2 berjumlah 1 (5,2%) orang.

#### IV.2.12 Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

**Tabel IV.7**

##### **Sarana dan Prasaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi / Keadaan	
			Baik	Rusak
	1	2	3	4
1.	Station Wagon (Mobil)	4	3	1

2.	Sepeda Motor	6	6	-
3.	Scanner (Universal Taster)	1	1	-
4.	Lemari Besi/Metal	7	7	-
5.	Lemari kayu	2	2	-
6.	Filling Cabinet Besi	4	4	-
7.	Lemari Display	1	1	-
8.	Papan Visual/Papan Nama	18	18	-
9.	Over Head Projector	2	2	-
10.	White Board Electronic	1	1	-
11.	Display	1	1	-
12.	Focus Screen/ Layar LCD	2	2	-
13.	Alat Kantor Lainnya	1	1	-
14.	Meja Kerja Kayu	23	23	-
15.	Kursi Besi/ Metal	30	30	-
16.	Kursi Kayu	7	7	-
17.	Meja Rapat	2	2	-
18.	Meja Komputer	2	2	-

19.	Meja Telpo	1	5	-
20.	Kursi Fiber Glas	5	5	-
21.	Meubelei Lainnya	1	1	-
22.	A.C. Split	5	5	-
23.	Kipas Angin	4	4	-
24.	Televisi	3	3	-
25.	Tape Recorder	1	1	-
26.	Sound System	2	2	-
27.	Wireless	1	1	-
28.	Stabilisator	14	1	5
29.	Tiang Bendera	1	1	-
30.	Dispenser	2	2	-
31.	Handy Cam	1	1	-
32.	Camera Electronic	1	1	-
33.	Camera Digital	1	1	-
34.	Peralatan Studio video dan film	2	2	-

35.	Intermediate Telepone	1	1	-
36.	Facsmile	2	2	-
37.	Unit Tape Recorder	1	1	-
38.	Kursi Dorong	10	10	-
39.	Klem Jaringan	1	1	-
40.	Generator set	1	1	-
41.	P.C. Unit	34	32	-
42.	Laptop	4	4	1
43.	Note Book	16	14	1
44.	Hard Disk	2	2	-
45.	Scanner (Universal Taster)	5	5	-
46.	Printer	28	24	-
47.	External	1	1	-
48.	DVD writer	2	2	-
49.	Scanner (Peralatan Personal komputer)	10	10	-
50.	Peralatan Komputer lainnya	4	4	-



51.	Hub	3	2	-
52.	Switch	1	1	-
53.	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>286</b>	<b>261</b>	<b>8</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

Berdasarkan tabel IV.5 diatas sarana dan prasarana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam menunjang kinerjanya dalam keadaan baik hanya saja ada kerusakan di station wagon, laptop, nootbok dengan masing – masing jumah 1. Kemudian ada juga kerusakan di stabiisator dengan jumlah 5.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian deskriptif kualitatif penulis memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan penulis dengan memilih orang-orang yang mengetahui persis seluk beluk permasalahan penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemilukada tahun 2018 (study kasus Divisi Perencanaan Program dan Data), untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Tegal, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat serta solusi kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data.

Pokok-pokok penelitian mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemilukada tahun 2018 (study kasus Divisi Perencanaan Program dan Data) dicermati dari unit analisis sebagai berikut:

#### **1. Kinerja Komisioner**

##### **a. Produktivitas**

- Sikap pegawai
- Kemampuan
- Semangat bekerja

##### **b. Kualitas Layanan**

- Kesalahan
- Kerusakan
- Kecermatan dalam melaksanakan tugas

##### **c. Responsivitas**

- Menggali kebutuhan masyarakat
- Menyusun agenda

d. Responsibilitas

e. Akuntabilitas

Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2018. Informan dalam penelitian ini adalah : 1. Komisioner KPU Kabupaten Tegal Divisi Perencanaan Program dan Data 2. Sekretaris KPU Kabupaten Tegal 3. Ka Subag Perencanaan Program dan Data 3. Anggota/ staff KPU Kabupaten Tegal bagian Perencanaan Program dan Data 4. Anggota/ staff Bawaslu Kabupaten Tegal 5. Masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

## **V.1 Hasil Penelitian**

### **Kinerja Komisioner**

#### **A. Produktivitas**

Yaitu dalam indikator ini memiliki ukuran diantaranya : sikap pegawai yaitu dimana dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien, kemampuan dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya, semangat kerja yang diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas.

#### **- Sikap pegawai**

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana sikap pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan program anggaran pemilu pada tahun 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam hal ini teman-teman dari pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data ini ya secara umum itu baik dalam artian bahwa semua yang direncanakan dalam program dan data itu berdasarkan dengan regulasi yang ada dan standar anggaran-anggaran, jadi karena program itu kan di rencanakan, karena kan di perencanaan ada itu sudah berdasar peraturan yang ada sudah standar nasional dan juga standar daerah itu sudah direncanakan semuanya.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sudah baik, karena dalam penyusunan anggaran Pemilukada serentak 2018 sebagian dari Divisi Perencanaan Program dan Data karena sudah sesuai dalam Permendagri 54 tentang penyusunan anggaran pemilukada, sumber pembiayaan pemilu dan kewajiban KPU Kabupaten dalam pelaksanaan pemilukada. Penyusunan anggaran Pemilukada serentak sebagian dari Divisi Perencanaan Program dan Data menetapkan anggaran sudah sebagaimana PKPU No 2.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam meyusun program terhadap pilkada semuanya sudah diatur melalui mekanisme yang telah dikeluarkan oleh KPU pusat dan mengacu pada PKPU yang ada, jadi pegawai hanya tinggal mengikuti proses sesuai dengan tahapan yang ada, dalam penyusunan angaran sendiri sebenarnya sudah dimulai jauh-jauh hari yaitu sekitar tiga tahun sebelum pelaksanaan pilkada tahun 2018.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Selalu mengikuti dan antusias mengikuti rapat penyusunan anggaran serta selalu berkoordinasi dengan KPU yang lain agar mendapatkan program kerja yang selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa sikap pegawai dalam hal ini sangat antusias dan mengikuti setiap mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam PKPU no. 2 serta telah mengacu pada permendagri 54 adapun dalam tahap penyusunan anggaran sendiri telah dilakukan jauh-jauh hari yaitu sekitar 3 tahun sebelum dilaksanakannya Pemilukada seentak tahun 2018, KPU kabupaten tegal juga ber koordinasi dengan KPU lain untuk menyelaraskan pelaksanaan penyusunan anggaran ini.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana sikap pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) dan Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Ya, tentunya sikapnya baik, secara umum baik mengingat bahwa pemilukada ini sangat berkaitan langsung dengan teman-teman semuanya karena siapapun yang ada disini juga kan termasuk dalam daftar pemilih dan juga apa yang kita hasilkan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga sikapnya cukup pro aktif dalam artian disini sikapnya baik untuk kaitanya dengan pemutakhiran data pemilih.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Arief Syarifudin, SIP (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sikap pegawai terhadap pemutakhiran data pemilih mempersiapkan alat-alat kelengkapan yang berkaitan dengan daftar pemilih missal mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, mempersiapkan data sanding yang berupa DP4 (daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan ) dengan DPT Pilpres tahun 2014.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan :

*Sikap pegawai dalam pemutakhiran selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini (ppk dan disdukcapil) agar dalam pemutakhiran dapat terlaksana dengan sukses serta agar mendapatkan data pemutakhiran yang akurat dan akuntabel.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam pemutakhiran data pemilih Divisi Perencanaan Program dan Data terlebih dahulu mempersiapkan data-data kebutuhan untuk penyusunan daftar pemilih seperti DP4 dan DPT Pilpres tahun 2014 dan juga ber koordinasi dengan pihak terkait baik itu BadanAdhock yang berada dibawah KPU yaitu PPK maupun dias terkait seperti Disdukcapil.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Informan yaitu Bagaimana bagaimana sikap pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data apabila terjadi kendala pada pengelolaan jaringan IT?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Proaktif, sikapnya proaktif artinya kerusakan-kerusakan IT yang ada disini apakah itu jaringan wifi kita untuk segera dapat memperbaikinya, anggotanya sangat proaktif untuk memperbaikinya jadi apabila terjadi kendala-kendala apakah dengan penyedia jasanya dalam hal ini adalah PT Telkom kita cukup proaktif.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Jika terjadi kendala dalam pengelolaan jaringan IT kami selalu berkoordinasi dengan PT Telkom Indonesia supaya dapat cepat diperbaiki.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kendala jaringan IT – selalu berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan dalam hal ini adalah PT. Telkom Indonesia.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam setiap tahapan tentunya kami tidak menginginkan adanya kendala. Namun pada intinya kami sudah berupaya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini (Telkom Slawi) dan dari pihak telkom siap membantu dan membackup dalam jaringan IT.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa pegawai sangat proaktif dan selalu ber koordinasi dengan pihak penyedia layanan dalam hal ini PT. Telkom Indonesia slawi

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apa respon masyarakat terhadap scan hasil Pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Respon masyarakat sangat baik ini terbukti banyak sekali masyarakat yang melalui langsung datang ke KPU Kabupaten Tegal maupun melalui jejaring sosial ini menanyakan hasil dari Pemilukada padahal sudah kita sampaikan bahwa hasil itu kita scan sekalian kita entry ke bagian server yang sudah disediakan oleh KPU RI dan masyarakat bisa melihat secara langsung datang kesini, sebenarnya responnya bagus mereka selalu memantau ini kami buktikan dengan banyaknya postingan-postingan di facebook ya itu aja, jadi di facebook itu postingan hasil scan dari kita yang sudah kita entry dan publish.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Respon masyarakat dalam hasil scan Pemilukada serentak 2018 cukup baik, terbukti dari tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan Pemilukada serentak 2018.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2018 terbukti dengan banyaknya masyarakat yang datang langsung ke kantor KPU maupun melalui jejaring sosial yang menanyakan hasil scan Pemilukada, hasil scan sendiri setelah di scan dan langsung di entry ke server KPU RI.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana sikap pegawai dalam pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Terkait dengan sikap pegawai terkait dengan pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018 ini cukup bagus, cukup baik, bahwa laporan-laporan yang sudah kita buat itu sudah kita laporkan semua yaa seluruh tahapan-tahapan jadi dari data yang sudah kita kelola mulai dari awal tahapan sampai akhir sudah kita laporkan semuanya.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sikap pegawai dalam pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilukada serentak 2018 baik, dapat menerima segala masukan dengan baik dan dan kerja sesuai petunjuk teknis.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sikap pegawai dalam pelaporan dan evaluasi – selalu kooperatif dan menerima semua masukan yang memang bersifat membangun kooperatif dalam hal ini adalah bertanggungjawab terhadap beban kerja yang telah dibebankan atau diberikan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam pelaporan dan evaluasi KPU kabupaten Tegal telah melaporkan semua tahapan-tahapan dari mulai tahapan awal hingga akhir tahapan sesuai dengan



petunjuk teknis yang ada, dan sikap pegawai sangat terbuka dalam menerima setiap kritik maupun saran yang masuk.

Berdasarkan jawaban dari 5 pertanyaan di atas mengenai sikap pegawai, peneliti simpulkan bahwa sikap pegawai secara keseluruhan sangat siap mulai dari tahap penyusunan anggaran yang memang sudah ada dalam PKPU no. 2 dan atas dasar keputusan Permendagri 54, dalam tahap penyusunan sendiri sudah dimulai tiga tahun sebelum pelaksanaan pilkada, begitupula dengan persiapan sarana penunjang lain seperti ketersediaan jaringan IT yang memang menjadi faktor penting dalam pemutakhiran data dan scan hasil pemilu yang nantinya dikirim ke server pusat KPU RI, pegawai selalu proaktif dalam menyikapi ketersediaan jaringan IT itu terbukti dengan selalu berkoordinasinya pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dengan penyedia layanan yaitu dalam hal ini PT. Telkom Indonesia (slawi), kemudian dalam tahap pemutakhiran data pemilih Divisi Perencanaan Program dan Data juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait baik dengan PPK maupun dinas-dinas terkait seperti Disdukcapil pemutakhiran sendiri diawali dengan mempersiapkan data pembandng yaitu DP4 dan DPT pilpres tahun 2014, pegawai KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini divisi Perencanaan Progrm data dan Informasi juga sudah menyelesaikan semua tahap pelaporan dan evaluasi dan menerima semua masukan serta kritik dari pihak manapun.

#### **a. Kemampuan**

1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana kemampuan pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan program dan anggaran?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Saya rasa sangat baik untuk pegawai divisinya dalam penyusunan program dan anggaran meskipun pegawainya kurang akan tetapi yang ada ini sangat baik sekali karena kita mampu merespon terkait perencanaan-perencanaan yang sudah kita lakukan maupun revisi-revisi yang ada dari perencanaan-perencanaan tersebut.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kemampuan pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan program dan anggaran sudah baik karena berjalan berdasarkan program kegiatan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh KPU RI, dan mengikuti bimtek kemampuan ini di selenggarakan mengikuti program kerja yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi sesuai dengan kebutuhan manajemen Pemilukada.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Selama ini semua tugas yang dibebankan kepada divisi dapat dikerjakan dengan sangat baik dan dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ada.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Penyusunan program dan anggaran pada dasarnya di KPU Kabupaten Tegal adalah bersifat top down, artinya semua program kegiatan sudah disusun dan di program oleh Eselon 1 (KPU RI) dan KPU Kabupaten/ Kota hanya menjalankan atau menyesuaikan sesuai dengan tahapan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa walaupun divisi perencanaan program dan data kekurangan pegawai tapi mampu merespon perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, serta untuk meningkatkan kemampuan pegawai KPU Kabupaten Tegal

selalu mengikuti bimtek yang diselenggarakan KPU Provinsi sesuai dengan Program Kerja yang telah ditentukan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan pegawai dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu pada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tentu saja, sangat berpengaruh karena tidak semua kemudian orang bisa mengelola aplikasi-aplikasi ataupun terkait dengan teknis pengelolaan pemutakhiran data pemilih kalo mereka tidak menguasai dibidang ini mereka gak akan bisa, jadi tingkat pendidikan berpengaruh, jadi kalau orang biasa dikasih tugas sesuai dengan alur pemutakhiran agak susah.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Iya, karena SDM yang melakukan data data pemilih dan informasi adalah mereka yang berbasis SDM berkemampuan IT dan ditambah upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Tegal didalam meningkatkan kemampuan SDM melalui mengiktsertakan diklat teknis, bimtek, dan rapat teknis yang diselenggarakan ditingkat Provinsi dan Nasional ditingkat KPU Pusat.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sedikit banyak memang sangat mempengaruhi kinerja pada Divisi Perencanaan Program dan Data, paling tidak pegawai harus mempunyai kemampuan yang cukup dalam bidang teknologi informasi karena pada tahapan pemutakhiran data sangat dibutuhkan kemampuan analisis yang baik, karena dalam pemutakhiran data pemilih digunakan sistem informasi tersendiri yang semuanya terkomputerisasi, dalam hal ini KPU Kabupaten Tegal menggunakan aplikasi SIDALIH ( sistem informasi data pemilih ).*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pada dasarnya pendidikan sangatlah utama dalam pemutakhiran data pemilih dan sisitem informasi akan tetapi dalam pemutakhiran data keuletan, kesabaran, ketelitian serta mampu beradaptasi dengan masyarakat itu lebih utama serta mampu memberikan edukasi secara langsung ataupun melalui media sosial.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tingkat pendidikan sangat penting terutama kemampuan menguasai bidang IT karena dalam setiap tahap di divisi Program data dan Informasi selalu melibatkan komputerisasi terutama dalam pemutakhiran data pemilih.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana kemampuan anggota divisi perencanaan program dan data dalam mengelola jaringan IT?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sangat baik, kenapa saya katakan sangat baik karena bahwa seluruh jaringan pengelolaan ini kita lakukan sendiri, jadi ini kita lakukan sendiri bukan orang luar, bagaimana sistem jaringan internal kecuali jaringan eksternal, kalo eksternal kan berarti penyedia jaringan semacam Telkom ataupun yang lainnya jadi, jaringan internal disini ini diseting sendiri oleh kita.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sejauh ini cukup baik terbukti dengan tidak adanya kendala yang berarti dalam tahapan pemilukada tahun 2018, baik dalam pemutakhiran data pemilih maupun scan hasil pemilu yang memang mewajibkan harus selalu terhubung dengan server pusat.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tidak di pungkiri perencanaan program dan data bekerja memang lebih banyak menggunakan jaringan IT jadi setidaknya anggota Divisi Perencanaan Program dan Data KPU kabupaten Tegal mampu mengelola jaringan IT.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam mengelola jaringan IT yang berkaitan dengan jaringan internal KPU Kabupaten Tegal tidak melibatkan pihak luar sama sekali bearti dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai terutama divivi program dan data sudah sangat bagus.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana kemampuan anggota Divisi Perencanaan Program dan Data dalam scan hasil pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sangat baik, karena sesuai dengan target, scan C-1 sudah dapat kita raih*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam Pemilukada tahun 2018 KPU Kabupaten Tegal bekerjasama dengan salah satu sekolah tinggi yang memang memiliki kompetensi di bidang computer, yaitu bekerja sama dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal, dalam hal ini pegawai KPU Kabupaten Ttegal berperan sebagai pengawas dan pengarah proses scan Hasil Pemilu tahun 2018.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Anggota Divisi Perencanaan Program dan Data memback up kegiatan scan Pemilukada Serentak pada dasarnya ini bukan tupoksinya akan tetapi output akan kegiatan ini adalah bagian dalam program dan data.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa untuk proses scan sendiri sebenarnya bukan tupksi dari divisi Perencanaan Program dan Data tetapi hasil dari scan merupakan bagian dari divisi Program dan data, proses scan C-1 melibatkan pihak ke 3 yaitu POLITEKNIK Harapan Bersama Tegal, dan pegawai sendiri berperan sebagai pengawas dan pengarah, dari wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai sudah sangat baik terbukti dengan rampunya proses scan C-1 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana kemampuan anggota Divisi Perencanaan Program dan Data dalam pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Cukup baik, tidak sangat cepat akan tetapi sebelum batas akhir kita sudah melaporkan semuanya.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kemampuan dalam evaluasi dan pelaporan sudah cukup baik terbukti dengan sudah terlapornya semua kegiatan sebelum batas akhir waktu yang sudah ditentukan.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kemampuan sudah cukup baik dibuktikan dengan sudah rampungnya pelaporan dan evaluasi tersebut.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Harus mampu memberikan pelaporan dan evaluasi karena output dari kegiatan ini sebagai bahan untuk memperbaiki kegiatan yang akan datang.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kemampuan dalam memberikan pelaporan dan evaluasi sudah cukup baik sebelum batas waktu yang ditentukan pegawai divisi pemrograman dan data mampu menyelesaikan laporan, laporan tersebut juga sebagai acuan untuk bahan perbaikan kegiatan yang akan datang.

Berdasarkan jawaban dari 5 pertanyaan diatas mengenai kemampuan, peneliti simpulkan bahwa divisi perencanaan program dan data sudah baik artinya mampu merespon perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, serta untuk meningkatkan kemampuan pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data selalu mengikuti bimtek yang diselenggarakan KPU Provinsi sesuai dengan Program Kerja yang telah ditentukan, begitu pula tingkat pendidikan sangat penting terutama kemampuan menguasai bidang IT karena dalam setiap tahap di divisi Program data dan Informasi selalu melibatkan komputerisasi terutama dalam pemutakhiran data pemilih, maka dari itu dalam mengelola jaringan IT yang berkaitan dengan jaringan internal KPU Kabupaten Tegal tidak melibatkan pihak luar sama sekali, kemudian untuk scan hasil pemilukada kinerja pegawai sudah sangat baik terbukti dengan rampunya proses scan C-1 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, selanjutnya kemampuan dalam memberikan pelaporan dan evaluasi kinerjanya juga sudah baik sebelum batas waktu yang ditentukan pegawai divisi pemrograman dan data mampu menyelesaikan laporan.

**b. Semangat bekerja**

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana semangat kerja pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan program dan anggaran?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Semangat kerja di divisi ini harus baik, karena kalau lambat ini gak bisa jalan. jadi, semangatnya memang harus baik karena kita bekerja berdasar deadline semuanya, kalo contoh saja penetapan-penetapan semuanya deadline paling lambat tanggal sekian harus, berarti semuanya harus tepat, harus baik dan memang saya yakin temen-temen bekerja sudah baik sekali.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Semangat kerja dalam penyusunan program dan anggaran sangat baik, setiap personel diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM baik dalam bentuk diklat, bimek, dan rapat teknis di tingkat Provinsi maupun Pusat.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Semangat kerja dalam penyusunan program dan anggaran sangat positif, pegawai melaksanakan setiap tahap penyusunan program dan anggaran dengan sangat teliti dan bertanggungjawab*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pada Divisi Perencanaan Program dan Data harus semangat, jika tidak semangat tidak akan tersusunya program yang baik, jadi semangat kerjanya sudah baik terbukti dengan kelancaran tersusunya program.*



Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa Semangat kerja di divisi perencanaan program dan data harus baik . Jadi, semangatnya memang harus baik karena kita bekerja berdasar deadline semuanya, kemudian setiap personel diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM baik dalam bentuk diklat, bimek, dan rapat teknis di tingkat Provinsi maupun Pusat, sehingga kinerja pegawai dalam melaksanakan setiap tahap penyusunan program dan anggaran dengan sangat teliti dan bertanggungjawab.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana semangat kerja pegawai dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sama baik, iya semuanya baik, termasuk semangat pegawai*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Semangat pegawai dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi baik, dibentuk dalam mekanisme kinerja terukur yaitu sesuai batasan waktu yang ditentukan atau ditetapkan jadwal waktu tahapan program kegiatan Pemilukada serentak 2018.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Mengenai semangat kerja dalam pemutakhiran data pemilih pegawai memang harus banyak-banyak mendapat apresiasi yang tinggi karena seperti yang kita ketahui bahwa kab. Tegal salah satu kabupaten dengan pemilih diatas 1 juta pemilih hal itu juga yang menyebabkan kenapa harus diberi*

*apresiasi yang tinggi, dengan jumlah pemilih yang terbilang tinggi pegawai dapat melaksanakan setiap tahap pemutakhiran dengan tepat waktu dan tanpa ada kendala yang berarti, memang tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kendala tapi semua itu bersifat teknis, seperti listrik yang tiba-tiba padam sendiri atau ngelek.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam pemutakhiran, semangat, ketelitian, dalam kerja anggota Divisi Perencanaan Program dan Data sangatlah penting supaya mendapatkan data yang akurat dan valid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa semangat kerja sudah sangat baik terbukti dengan jumlah pemilih yang lebih dari 1 juta pemilih semua tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan, untuk mendapat data yang akurat dan valid dalam pemutakhiran data pemilih juga diperlukan ketelitian dalam bekerja.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana semangat kerja pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam pengelolaan jaringan IT?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Iya baik saja, dan sudah baik memang, ini untuk semua pengelolaan IT sangat baik.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam pengelolaan jaringan IT pegawai selalu sigap dan sudah faham masalah jaringan, dan berupaya semaksimal mungkin apabila ada kendala pegawai dapat memperbaikinya dengan cepat.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sejalan dengan poin no 2 tadi, pemutakhiran tidak dapat berjalan jika jaringan IT terputus, maka dalam hal ini pegawai sudah sangat baik dalam hal pengelolaan jaringan IT, terlebih semua kendala jaringan rata-rata pegawai sudah memahaminya jadi bisa cepat terselesaikan dengan cepat.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam pengelolaan jaringan IT Divisi Perencanaan Program dan Data selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Tegal dan masyarakat luas terkait agenda Pemilukada serentak.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam pengelolaan jaringan IT kpu kabupaten tegal dapat dengan cepat mengatasi masalah jaringan, pegawai juga sudah dibekali dengan kemampuan yang cukup apabila terjadi kendala, divisi perencanaan Program dan Data juga memaksimalkan upaya untuk selalu memberikan informasi ke pada masyarakat terkait Pemilukada serentak 2018.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana semangat kerja pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam scan hasil pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk dalam scan hasil Pemilukada serentak 2018 ini saya rasa sudah sangat baik sekali bahwa kecepatan untuk scan dan kemudian mempublish ke masyarakat itu sudah sesuai dengan target yang sudah kita tentukan, targetnya misal adalah lima hari selesai kami dalam target waktu ditentukan alhamdulillah kita dapat menyelesaikannya. Meskipun ada kendala diservernya di pusat, tetapi kita dapat menyelesaikan semuanya.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Walaupun KPU Kabupaten Tegal dalam scan hasil pemilu melibatkan pihak ketiga, memang semua kelancaran tahapan ini tidak lepas dari pengawasan dan pengarahan dari para pegawai yang tidak kenal lelah dalam mengawasi walaupun terkadang sampai larut malam.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam scan hasil Pemilukada serentak 2018 Divisi Perencanaan Program dan Data sangat lah semangat untuk mem backup kegiatan ini*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam scan hasil pemilukada serentak KPU Kabupaten tegal berperan sebagai pengawas dan untuk prosesnya sendiri dilakukan oleh pihak ketiga, walau begitu KPU Kabupaten Tegal juga tetap mengawasi jalannya proses scan hasil pemilu hingga larut malam, walaupun terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis tetapi semua dapat berjalan dengan lancar walaupun terkadang proses scan memakan waktu hingga larut malam.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana semangat kerja pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Secara umum baik karena memang pelaporan dan evaluasi dapat kita lakukan sesuai dalam dengan tahapan yang sudah, meskipun tidak sangat*

*cepat sekali dalam awal tahapan tapi kita sudah bisa melakukan dan menyelesaikannya sebelum akhir tahapan.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Semangat kerja dalam pelaporan dan evaluasi slalu dilaksanakan evaluasi, pada saat kegiatan berjalan dan akhir kegiatan prodaknya yaitu daftar infentaris masalah sebagai bahan dan tujuan dilaksanakanya rapat pleno internal guna untuk mencari solusi, dan selalu mensupport satu sama lain dalam melaksanakan semua kegiatan.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam pelaporan dan evaluasi divisi sudah menyelesaikan pelaporan dengan sesuai tahap yang telah ditentukan maka dari itu bisa dikatakan semangat kerja divisi sudah sangat baik.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pada dasarnya semangat kerja kita ada team work (kerja tim) jadi Divisi Perencanaan Program dan Data selalu memberikan support dalam setiap kegiatan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa hasil evaluasi tidak terlepas dari kerjasama tim atau team work antara divisi satu dengan divisi yang lain saling memberikan support dalam setiap kegiatan, terbukti dengan rampunya tahap pelaporan dan evaluasi sebelum batas akhir yang sudah ditentukan.

Berdasarkan jawaban dari 5 pertanyaan di atas mengenai semangat bekerja peneliti simpulkan bahwa Semangat kerja di divisi perencanaan program dan data harus baik. Jadi, semangatnya memang harus baik karena kita bekerja berdasar deadline semuanya, ini terbukti dengan jumlah pemilih yang lebih dari 1 juta pemilih semua tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan, untuk mendapat data yang akurat dan valid dalam pemutakhiran data pemilih juga

diperlukan ketelitian dalam bekerja, kemudian pengelolaan jaringan IT Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal dapat dengan cepat mengatasi masalah jaringan, pegawai juga sudah dibekali dengan kemampuan yang cukup apabila terjadi kendala, dalam scan hasil pemilukada serentak KPU Kabupaten Tegal berperan sebagai pengawas dan untuk prosesnya sendiri dilakukan oleh pihak ketiga, walaupun terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis tetapi semua dapat berjalan dengan lancar walaupun terkadang proses scan memakan waktu hingga larut malam. Kemudian untuk evaluasi tidak terlepas dari kerjasama tim atau team work antara divisi satu dengan divisi yang lain saling memberikan support dalam setiap kegiatan, terbukti dengan rampunya tahap pelaporan dan evaluasi sebelum batas akhir yang sudah ditentukan.

Dari 3 kesimpulan diatas mengenai sikap pegawai, kemampuan, dan semangat bekerja bahwa dapat disimpulkan lagi bahwa untuk indikator produktivitas mengenai sikap pegawai, peneliti simpulkan bahwa sikap pegawai secara keseluruhan sangat siap mulai dari tahap penyusunan anggaran yang memang sudah ada dalam PKPU no. 2 dan atas dasar keputusan Permendagri 54, dalam tahap penyusunan sendiri sudah dimulai tiga tahun sebelum pelaksanaan pilkada, begitupula dengan persiapan sarana penunjang lain seperti ketersediaan jaringan IT yang memang menjadi faktor penting dalam pemutakhiran data dan scan hasil pemilu yang nantinya dikirim ke server pusat KPU RI. Selanjutnya mengenai kemampuan, peneliti simpulkan bahwa divisi perencanaan program dan data sudah baik artinya mampu merespon perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, serta untuk meningkatkan kemampuan pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data selalu mengikuti bimtek yang diselenggarakan KPU Provinsi sesuai dengan Program Kerja yang telah ditentukan, begitu pula tingkat pendidikan sangat penting terutama kemampuan menguasai bidang IT karena dalam setiap tahap di divisi Program data dan Informasi selalu melibatkan komputerisasi terutama dalam pemutakhiran data pemilih.

Kemudian mengenai semangat bekerja peneliti simpulkan bahwa semangat kerja di divisi perencanaan program dan data harus baik. Jadi, semangatnya memang harus baik karena kita bekerja berdasar deadline semuanya, ini terbukti dengan jumlah pemilih yang lebih dari 1 juta pemilih semua tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan, untuk mendapat data yang akurat dan valid dalam pemutakhiran data pemilih juga diperlukan ketelitian dalam bekerja, dan untuk evaluasi tidak terlepas dari kerjasama tim atau team work antara divisi satu dengan divisi yang lain saling memberikan support dalam setiap kegiatan, terbukti dengan rampunya tahap pelaporan dan evaluasi sebelum batas akhir yang sudah ditentukan.

## **B. Kualitas Layanan**

### **c. Kesalahan**

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat kesalahan dalam penyusunan program dan anggaran?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Secara umum bicara kesalahan ini kesalahannya minimal, sangat minim sekali ya saya tidak mengatakan tidak ada kesalahan tetapi tetap ada kekeliruan dalam perencanaan akan tetapi secara umum perencanaan ini sudah baik sekali, sudah baik dalam perencanaan karena sudah memenuhi kriteria standar-standar dari kemendagri dan juga saran-saran dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal jadi semuanya sudah kita ramu angka-angkanya sudah clear. Jadi tingkat kesalahan sangat minim sekali.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tingkat kesalahan dalam penyusunan program dan anggaran sudah baik, tidak bisa dipungkiri jika terjadi kesalahan tetapi kami selalu merevisi dan tepat dengan batas waktu yang ditentukan.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tingkat kesalahan dalam penyusunan program dan anggaran, kesalahan memang tidak dapat dipungkiri memang selalu ada tapi dapat diselesaikan dengan baik, terutama dalam hal revisi anggaran.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pada dasarnya KPU Kabupaten/ Kota tidak menyusun program dan anggaran karena penyusunan program dan anggaran kita bersifat top down (dari eselon 1) jadi jika ada ketidaksesuaian dengan kegiatan yang di Kabupaten Tegal maka Kabupaten merevisi kegiatan tersebut.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tingkat kesalahan memang ada tetapi dapat di atasi dengan baik, kesalahan dalam penyusunan anggaran biasanya akan segera direvisi dan kegiatan tersebut sudah dilakukan setiap ada kesalahan selalu dilakukan dengan tepat waktu, pada dasarnya KPU Kabupaten Tegal tidak menyusun program dan anggaran karena program dan anggaran sudah disusun di tingkatan yang lebih tinggi yaitu KPU RI KPU Kabupaten Tegal hanya merevisi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Tegal.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah ada kendala dan kesalahan dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pilkada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Ya secara umum kendala tetap ada bahwa dalam sistem pemutakhiran ini yang berhubungan dengan sisten informasi yang ada dikita ini kita tidak*



*mengelola sendiri ya kendalanya adalah yaa penyedia sistem informasinya dalam hal ini adalah KPU RI, dan seandainya tidak ada kendala di penyedia sistem informasi ini aplikasi yang dipunyai atau server yang dipunyai KPU RI maka saya yakin mungkin tidak ada masalah, jadi masalahnya sebenarnya kita nggantung saja masalah server yang dimiliki oleh KPU RI.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kendala dalam pemutakhiran data pemilih ada, tapi semuanya dapat diatasi dengan baik.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kendala dalam pemutakhiran data pemilih memang ada tetapi memang sebagian besar kesalahan teknis dalam sistem, semisal sistem yang tiba-tiba down atau tidak merespon sewaktu-waktu tapi itu dapat dimaklumi karena kabupaten tegal seperti yang kita ketahui memiliki 18 kecamatan dan lebih dari 1 juta pemilih jadi memang sangat wajar, untuk kesalahan sendiri memang kabupaten tegal masih memiliki cukup banyak masalah karena selain kab memiliki luas wilayah yang cukup luas dan memiliki 281 desa dan 6 kelurahan 18 kecamatan membuat kesalahan seperti ganda kependudukan baik dalam 1 desa atau antar desa antar kecamatan karena, tapi semua dapat di atasi dengan baik.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kendala: 1. Banyaknya masyarakat yang bekerja di luar Kabupaten/ Kota 2. Minimnya informasi 3. Kurangnya respon masyarakat akan manfaat pemutakhiran data. Kesalahan: masih adanya perbedaan disetiap masyarakat sehingga menyulitkan bagi kami dalam pemutakhiran data.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kendala-kendala yang muncul lebih banya bersifat teknis seperti dalam wawancara dikatakan kendala server pusat yang sering mengalami gangguan

dan dari sisi aplikasinya sendiri juga terkadang ada masalah tapi dalam garis besar kendala tersebut bersifat teknis dan dapat diselesaikan dengan cepat, kendala lain adalah dengan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah desa yang banyak membuat kesalahan data seperti kegandaan masih ada tapi tergolong minim, juga banyaknya masyarakat yang tinggal diluar Kabupaten Tegal juga menjadi masalah tersendiri, kurangnya informasi serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat pemutakhiran data pemilih juga menjadi masalah tersendiri.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat kesalahan dalam pengelolaan jaringan IT?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk pengelolaan jaringan IT tingkat kesalahannya saya anggap kekeliruan sangat kecil sekali bahkan mendekati tak ada kenapa? Karena sistem jaringannya sudah bagus yang bermasalah justru penyedia jasa jaringannya tersebut, permasalahannya terkadang jaringan terputus yang dimiliki oleh PT Telkom, kita disini clear sebenarnya nah kesalahan-kesalahannya mungkin hanya router, routernya saja terkadang routernya eror harus di restart dulu, ini hanya kekeliruan kecil saja, dan tidak sangat berpengaruh.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk kendala jaringan it sendiri tergolong kecil karena KPU Kab. Tegal menggunakan tingkat kecepatan yang tergolong tinggi yaitu 100 Mbps dan didukung kemampuan sarpras yang memadai dan kemampuan pegawai yang rata-rata mengerti tentang jaringan IT.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menangani pengelolaan jaringan IT. Sehingga untuk kesalahan pengelolaan jaringan tidak ada.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa untuk tingkat kesalah dalam pengelolaan jaringan IT sangat minim, dijelaskan pula bahwa sebagian besar ada di penyedia layanan yaitu PT. Telkom, untuk kesalahan internal sendiri biasanya hanya masalah router, kemampuan pegawai serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai juga membuat kesalahan dalam pengelolaan jaringan menjadi minim.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah ada kesalahan dalam hasil scan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Ya ada, akan tetapi sudah diperbaiki berdasar laporan, dan harus diketahui bahwa scan ini kan sifatnya adalah keterbukaan kita pada masyarakat bahwa hasilnya, ketika ada kekeliruan input dari hasil antara scan dengan entry ini silahkan masyarakat memberikan komentar, masukan bahwa ada kekeliruan-kekeliruan dan scan ini tidak atau bukan hasil akhir. Scan itu adalah hanya informasi awal saja untuk informasi masyarakat hasil akhirnya adalah rekap manual ditingkat kecamatan sama kabupaten itu yang dinamakan hasil akhir.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam pelaksanaan pemilukada tahun 2018 Alhamdulillah Clear 100%*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam Pemilukada serentak 2018 di mungkinkan tidak ada kesalahan scan, karena sebelum pelaksanaan setiap diberikan arahan untuk meneliti terlebih dahulu setiap yang akan di scan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kesalahan dalam proses scan hasil pemilu memang masih ada tetapi akan segera diperbaiki sesuai dengan laporan yang ada, hasil scan juga bersifat informasi public artinya bukan akhir dari perhitungan menurut hasil wawancara hasil akhir perhitungan adalah rekap manual dari tiap kecamatan yang akhirnya menjadi hasil akhir, sementara hasil scan hanya bersifat pemberitahuan saja, kesalahan dalam hasil scan juga sudah diminimalisir dengan selalu memberikan arahan untuk meneliti terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pen scan an.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah ada kesalahan dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk pelaporan ada kesalahan tapi bisa diperbaiki, ada kekeliruan tapi bisa diperbaiki karena semuanya kan berdasarkan konsultasi kita membuat setelah berkonsultasi, apabila perlu revisi kita perbaiki jadi masih ada batasan kesalahan, bukan kesalahan fatal tetapi kesalahan yang masih bisa diperbaiki semuanya karena memang harus berkonsultasi.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam tahap pelaporan dan evaluasi tidak ada kendala jika ada kita selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, dan merevisinya.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam tahap pelaporan juga tidak ada kendala yang berarti.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Jika ada kesalahan, kami berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan untuk segera memperbaiki pelaporannya.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kesalahan dalam pelaporan dan evaluasi selalu di koordinasikan dan dikonsultasikan dengan pihak terkait dan .

Berdasarkan jawaban dari 5 pertanyaan diatas mengenai kesalahan peneliti simpulkan bahwa tingkat kesalahan memang ada tetapi dapat di atasi dengan baik, kesalahan dalam penyusunan anggaran biasanya akan segera direvisi dan kegiatan tersebut sudah dilakukan setiap ada kesalahan selalu dilakukan dengan tepat waktu, begitu pula kendala-kendala yang muncul lebih banyak bersifat teknis seperti dalam server pusat yang sering mengalami gangguan dan dari sisi aplikasinya sendiri juga terkadang ada masalah untuk jaringan IT yaitu PT. Telkom, untuk kesalahan internal sendiri biasanya hanya masalah router, kesalahan dalam proses scan hasil pemilu memang masih ada tetapi akan segera diperbaiki sesuai dengan laporan yang ada, akan tetapi kendala yang ada dalam garis besar tersebut bersifat teknis dan dapat diselesaikan dengan cepat.

#### **d. Kerusakan**

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah ada kerusakan terkait sarana prasarana dalam pengelolaan jaringan IT pada pemilu pada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tidak ada, semuanya baik dan layak dipergunakan.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam sarana prasarana terkait pengelolaan jaringan IT pada Pemilu pada serentak 2018 tidak ada kerusakan, karena sudah dipersiapkan sebelumnya.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk sarana dan prasarana terkait jaringan IT tidak ada kerusakan sama sekali, karena sebelumnya KPU Kab. Tegal memang sudah mempersiapkan sarana Jaringan IT yang cukup mumpuni.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk kerusakan terkait sarana prasana tidak ada mbak.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kerusakan untuk sarana prasarana jaringan IT tidak ada.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah ada kerusakan dalam hasil scan pemilu pada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Iya ini silahkan dibedakan sendiri kalo rusakah hasil scan tidak ada, tetapi kalo servernya di bajak oleh para hacker sehingga macet tidak bisa*

*dibuka memang ada, jadi server di KPU RI itu di hack sampai mati total tidak bisa dibuka.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk hasil scan sendiri tidak ada kerusakan berarti, memang ada beberapa kerusakan tapi sifatnya tidak benar-benar rusak parah tapi masih tergolong rusak ringan seperti kertas yang terlipat, itupun kemungkinan dari proses distribusi jadi dapat dimaklumi.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk hasil scan tidak ada mbak.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa untuk kerusakan hasil scan tidak ada tapi ada beberapa kerusakan ringan pada kertas C-1 yang akan di scan seperti halnya kertas yang terlipat, sama halnya dengan kerusakan server KPU RI yang sempat di hack tapi dapat dipulihkan kembali.

Berdasarkan jawaban dari 2 pertanyaan di atas mengenai kerusakan peneliti simpulkan bahwa tidak ada kerusakan sama sekali baik itu dalam masalah jaringan IT ataupun hasil scan Pemilukada, memang ada beberapa kerusakan terkait server KPU RI yang sempat di hack dan tidak dapat beroperasi untuk beberapa saat, tetapi untuk sarana dan prasarana di KPU Kabupaten Tegal sendiri tergolong baik.

**e. Kecermatan dalam melaksanakan tugas**

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat kecermatan Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan program dan anggaran?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Baik, tingkat kecermatan baik karena kita sudah perbaikan, jadi saya anggap baik dalam kecermatan.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tingkat kecermatan dalam perencanaan program dan data tingkat kecermatan sudah sangat baik dibuktikan dengan berjalannya program yang telah disusun.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kecermatan sangat penting, agar tersusun program dan anggaran yang baik. Disini kami program dan anggaran sudah tersusun dengan baik jadi kecermatan sudah dapat dianggap baik.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tingkat kecermat divisi sudah baik, dibuktikan dengan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik.

2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana kecermatan dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Baik, tingkat kecermatan dalam baik dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:



*Dalam kecermatan ditingkat pemutakhiran sudah baik karena terbukti tidak adanya komplek dari peserta Pemilukada maupun Masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih Pemilukada serentak 2018.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Di tingkat pemutakhiran data memang dibutuhkan tingkat yang cukup tinggi karena divisi harus benar-benar mempertanggungjawabkan hasil pemutakhiran ke pada public, dan terbukti dengan tidak adanya complain maka tingkat kecermatan dari divisi sudah sangat baik*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk mendapatkan pemutakhiran data yang akurat dan akuntabel, kecermatan sebagai modal pokok dalam kegiatan ini.*

Menurut Wandu Priyogi, SH (selaku Anggota/ staff Bawaslu Kabupaten Tegal) pada tanggal 18 Juli 2019, mengatakan:

*Pemutakhiran data dalam hal ini adalah penyusunan daftar pemilih tetap. Kami rasa KPU Kabupaten Tegal sudah sangat memuaskan disetiap tahapan, khususnya dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilukada Serentak 2018 KPU Kabupaten Tegal telah memenuhi syarat keterbukaan dalam informasi, dalam penyusunan daftar pemilih, memang walau ada beberapa kendala dalam penyusunan daftar pemilih, seperti pemilih meninggal yang seharusnya TMS (tidak memenuhi syarat) masih masuk dalam DPT tetapi kasus tersebut terbilang masih sedikit dan dapat dimaklumi karena dalam tahap penyusunan dari DPS ke DPT memang memakan waktu beberapa bulan, secara keseluruhan menurut kami Divisi Perencanaan Program dan Data sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik.*

Menurut Uli Amri (selaku masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih) pada tanggal 18 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam hal ini sudah baik, tetapi saya belum puas karena dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada serentak 2018 Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan saya sendiri yang belum terdaftar sebagai pemilih. Yang berakibat saya tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Serentak tahun 2018.*

Menurut Heni Mafrudah (selaku masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih) pada tanggal 18 Juli 2019, mengatakan:

*Menurut saya, KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan daftar pemilih sudah lumayan bagus, tapi memang masih perlu perbaikan terutama warga yang sudah pindah ke desa lain tapi masih terdaftar di desa kami dan setau saya orang tersebut juga terdaftar di desa lain, tapi menurut saya sudah lumayan baik.*

Menurut Eti (selaku masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih) pada tanggal 18 Juli 2019, mengatakan:

*Menurut saya dalam penyusunan daftar pemilih Kecermatan dalam melaksanakan tugas Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal sudah lumayan baik, tetapi ada yg perlu diperbaiki yaitu warga yang sudah meninggal tetapi masih masuk ke dalam DPT, dalam hal ini terjadi pada suami saya sendiri yang sudah Almarhum tetapi namanya masih muncul kembali dalam daftar pemilih.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa ada beberapa kesimpulan dalam wawancara diatas diantaranya adalah 1) KPU kabupaten tegal telah melakukan pemutakhiran data sesuai dengan asas keterbukaan informasi public, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan bagi masyarakat yang akan memberimaskan ke KPU Kabupaten tegal melalui mekanisme yang sudah ditentukan. 2) Masih terdapatnya masalah yang sering muncul dimasyarakat seperti halnya hasil wawancara dengan respnden umum menunjukan bahwa tingkat kepercayaan public terhadap hasil

kecermatan KPU Kabupaten Tegal dalam menyusun daftar pemilih tergolong baik, kesalahan seperti pemilih ganda maupun pemilih TMS lainnya memang umum terjadi tetapi dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdapat pada tingkatan badan AdHock dibawah KPU Kabupaten Tegal.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat kecermatan Divisi Perencanaan Program dan Data dalam pengelolaan jaringan IT?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sangat baik, karena disini tidak pernah ada kesalahan dalam pengelolaan jaringan IT, paling kesalahan yang hanya diakibatkan oleh servernya.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk kecermatan jaringan IT pegawai memiliki kecermatan dan kecakapan yang cukup mumpuni karena setiap ada kesalahan mereka langsung sigap dan siap mengatasi.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kecermatan dalam pengelolaan dalam jaringan IT setiap anggota Divisi Perencanaan Program dan Data selalu berkoordinasi.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa untuk kecermatan dalam pengelolaan jaringan IT sudah baik karena setiap anggota divisi pemrograman dan data selalu siap dan sigap serta selalu berkoordinasi dengan pihak lainnya.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat kecermatan Divisi Perencanaan Program dan Data dalam hasil scan Pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Hasil scan dalam tahapan pemilukda juga sudah sangat baik karena kemaren hasil scan tingkat kekeliruan scan itu sangat minim sekali, untuk kesalahan mengentry itu mendekati tidak ada yaa walaupun ada jumlahnya itu juga sangat sedikit sekali.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kecermatan dalam hasil scan Pemilukada serentak 2018 sudah baik, karena kita selalu memverifikasi format yang akan di scan agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam hasil scan sangat baik, walaupun pegawai hanya sebagai pengawas dan pengarah.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam scan hasil Pemilukada serentak 2018 kita selalu memverifikasi semua format yang akan di scan agar hasilnya akurat.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa untuk kecermatan hasil scan KPU Kabupaten tegal terutama divisi Pemrograman dan data hanya sebagai pengawas dan pengarah akan tetapi setiap hasil scan yang akan di entry ke server KPU RI, KPU Kabupaten tegal akan memverifikasi semua format yang akan di scan yang dimaksudkan agar mendapatkan hasil scan yang akurat, memang masih ada kesalahan dalam peng entryan tapi sifatnya sangat minim sekali.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat kecermatan Divisi Perencanaan Program dan Data dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018 ?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kecermatan dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilukada serentak 2018 ini juga sudah baik, dan terlaksana dengan baik.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk pelaporan dan evaluasi sudah cukup baik.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam hasil pelaporan kita selalu berkoordinasi dengan pihak terkait agar terciptanya pelaporan dan evaluasi yang akurat, akuntabel, dan kredibel.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kecermatan dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilukada serentan sudah baik, hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara divisi dengan pihak terkait.

Berdasarkan jawaban dari 5 pertanyaan di atas mengenai kecermatan dalam melaksanakan tugas peneliti simpulkan bahwa tingkat kecermatan divisi sudah baik, dibuktikan dengan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik dan

1) KPU kabupaten tegal telah melakukan pemutakiran data sesuai dengan asas keterbukaan informasi public, 2) Masih terdapatnya masalah yang sering muncul dimasyarakat seperti halnya hasil wawancara dengan respnden umum menunjukan bahwa tingkat kepercayaan public terhadap hasil kecermatan KPU Kabupaten tegal dalam menyusun daftar pemilih tergolong baik, kesalahan seperti pemilih ganda

maupun pemilih TMS lainnya memang umum terjadi tetapi dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdapat pada tingkatan badan AdHock dibawah KPU Kabupaten Tegal, selanjutnya kecermatan dalam pengelolaan jaringan IT sudah baik karena setiap anggota divisi pemrograman dan data selalu siap dan sigap serta selalu berkoordinasi dengan pihak lainnya, akan tetapi kecermatan hasil scan KPU Kabupaten tegal terutama divisi Pemrograman dan data hanya sebagai pengawas dan pengarah akan tetapi setiap hasil scan yang akan di entry ke server KPU RI, KPU Kabupaten tegal akan memverifikasi semua format yang akan di scan yang dimaksudkan agar mendapatkan hasil scan yang akurat, kemudian kecermatan dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilukada serentan sudah baik, artinya tidak terlepas dari koordinasi antara divisi dengan pihak terkait.

Dari 3 kesimpulan diatas mengenai kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas dapat disimpulkan lagi bahwa untuk indikator kualitas layanan mengenai kesalahan bahwa tingkat kesalahan memang ada tetapi dapat di atasi dengan baik, kesalahan dalam penyusunan anggaran biasanya akan segera direvisi, begitu pula kendala-kendala yang muncul lebih banyak bersifat teknis seperti dalam server pusat yang sering mengalami gangguan dan dari sisi aplikasinya sendiri juga terkadang ada masalah untuk jaringan IT yaitu PT. Telkom, untuk kesalahan internal sendiri biasanya hanya masalah router, kesalahan dalam proses scan hasil pemilu memang masih ada tetapi akan segera diperbaiki sesuai dengan laporan yang ada, akan tetapi kendala yang ada dalam garis besar tersebut bersifat teknis dan dapat diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya mengenai kerusakan peneliti simpulkan bahwa tidak ada kerusakan sama sekali baik itu dalam masalah jaringan IT ataupun hasil scan Pemilukada, memang ada beberapa kerusakan terkait server

KPU RI yang sempat di hack dan tidak dapat beroperasi untuk beberapa saat, tetapi untuk sarana dan prasarana di KPU Kabupaten Tegal sendiri tergolong baik. Kemudian mengenai kecermatan dalam melaksanakan tugas peneliti simpulkan bahwa tingkat kecermatan divisi sudah baik, dibuktikan dengan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik dan 1) Divisi Perencanaan Program dan Data telah melakukan pemutakhiran data sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik, 2) Masih terdapatnya masalah yang sering muncul dimasyarakat seperti halnya hasil wawancara dengan responden umum menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap hasil kecermatan dalam menyusun daftar pemilih tergolong baik, kesalahan seperti pemilih ganda maupun pemilih TMS lainnya memang umum terjadi tetapi dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdapat pada tingkatan badan AdHock dibawah KPU Kabupaten Tegal. kemudian kecermatan dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu serentak sudah baik, artinya tidak terlepas dari koordinasi antara divisi dengan pihak terkait.

### **C. Responsivitas dengan unit analisis:**

#### **f. Menggali kebutuhan masyarakat**

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana Divisi Perencanaan Program dan Data dalam melaksanakan pemutakhiran data dan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam untuk menggali kebutuhan masyarakat kita lebih pada media sosial dan media-media masyarakat artinya untuk membuktikan ini kan pemutakhiran, melaksanakan pemutakhiran dalam pemutakhiran untuk membuktikan bahwa seseorang sudah terdaftar atau belum terdaftar itu bisa melalui aplikasi android,*

*bisa juga melalui website nah dan juga bisa datang langsung kita juga sudah memberikan pengumuman distiap balaidesa kalo ingin mengecek secara manual yang berhubungan dengan PPS, artinya kita menggali kebutuhannya melalui banyak yah, mulai dari media-media medsos, website, internet ataupun media-media manual/ cetak di papan pengumuman desa ini sudah kita lakukan dalam menggali kebutuhan dalam hal pemutakhiran.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) dan Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemutakhiran data pemilih divisi program dan data selalu melibatkan masyarakat melalui tahap-tahap yang telah ada, missal masyarakat dapat memberi masukan atau bahkan complain jika data dalam daftar pemilih salah, hal itu dapat dilakukan melalui badan AdHock yang berkedudukan di desa atau biasa disebut dengan Panitia Pemungutan Suara ( PPS ).*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Berbagai macam upaya Divisi Perencanaan Program dan Data untuk melaksanakan pemutakhiran data, melakukan sosialisasi secara terbuka dan sosialisasi melalui media sosial serta media masa.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Tegal selalu menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat melalui PPS hal tersebut juga dilakukan KPU Kabupaten tegal dengan memberikan informasi-informasi ter akurat baik melalui jaringan media sosial maupun media cetak, dengan tujuan agar masyarakat dapat proaktif terhadap hasil pemutakhiran data pemilih yang dikelarkan oleh KPU Kabupaten tegal, KPU Kab. Tegal juga gencar melakukan sosialisasi secara terbuka dan melalui media sosial serta media masa.



- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana Divisi Perencanaan Program dan Data dalam menyampaikan scan hasil pemilu untuk kebutuhan masyarakat?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk kebutuhan masyarakat scan pemilu ini kan melalui alamat khusus. Kepada masyarakat kita hanya menyampaikan untuk mendapatkan hasil scan pemilu satu-satunya cara harus melalui alamat khusus website itu scan hasil pemilihan atau info pemilihan itu alamatnya khusus selain itu tidak bisa alamatnya hanya satu dan kita publikasikan alamat tersebut di papan pengumuman dan juga di media sosial – media sosial yang kita punya facebook instagram maupun twitter. Jadi silahkan masyarakat membuka alamat website tersebut karena memang ini khusus alamatnya cuma satu dan memang tidak ada duanya.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam menyampaikan hasil scan Pemilukada serentak 2018 kami mempublikasikan melalui media-media sosial yang kita punya, via website, dan media sosial.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam menyampaikan hasil scan kami mempublikasikan via website, media massa, dan media sosial.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa hasil scan pemilukada tahun 2018 dapat diakses melalui website khusus yang telah disediakan oleh KPU RI, dalam hal ini KPU Kab. Tegal hanya bersifat memberitahu ke masyarakat melalui media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tegal seperti media sosial Facebook, twitter, website serta media masa tautan untuk membuka hasil scan tersebut.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana Divisi Perencanaan Program dan Data dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilikada serentak 2018 untuk kebutuhan masyarakat?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Terkait dengan pelaporan ini sifatnya kedalam kami melaporkanya ke pimpinan yaa kemudahan kepada Pemerintah Daerah secara umum saja, kalo ke Pemerintah Daerah laporan anggaran yang sudah digunakan. Dan kalau ke masyarakat ini evaluasinya lebih pada mengundang stake holder jadi kelompok-kelompok masyarakat untuk mengevaluasi apa dan bagaimana dalam tahapan yang kita laksanakan, jadi tidak sangat terbuka sekali karena pelaporan kita lebih ke atas pimpinan, dan ke Pemerintah Daerah ini sebenarnya hanya memberi tahu.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk pelaporan dan evaluasi sudah melakukan sesuai dengan tahapan dan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi objek dari tahapan tahapan Pemilikada serentak 2018 dan kami selalu mem publikasikan setiap kegiatan melalui media sosial dan di website.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk pelaporan dan evaluasi divisi melakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada sesuai dengan PKPU.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kami publikasikan setiap kegiatan melalui media sosial dan di website.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa setiap pelaporan yang berkaitan dengan masyarakat maka akan di publikasikan melalui media sosial dan di website, secara keseluruhan memang pelaporan hasil evaluasi

sifatnya kedalam atau internal yaitu ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pimpinan dan kemudian untuk diteruskan ke pemerintah daerah tetapi sifatnya hanya pemberitahuan, dan untuk pelaporan KPU Kabupaten Tegal kepada masyarakat sifatnya adalah evaluasi dan itu terbatas untuk stakeholder dan kelompok masyarakat tertentu, jadi untuk hasil pelaporan tidak bersifat terbuka secara keseluruhan ke masyarakat.

Berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan di atas mengenai menggali kebutuhan masyarakat peneliti simpulkan bahwa dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilu KPU Kabupaten Tegal selalu menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat melalui PPS hal tersebut juga dilakukan KPU Kabupaten Tegal dengan memberikan informasi-informasi terakurat baik melalui jaringan media sosial maupun media cetak, kemudian untuk hasil scan pemilukada tahun 2018 dan setiap pelaporan yang berkaitan dengan masyarakat maka akan dapat diakses melalui website khusus yang telah disediakan oleh KPU RI, dalam hal ini KPU Kab. Tegal hanya bersifat memberitahu ke masyarakat melalui media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tegal seperti media sosial Facebook, twitter, website serta media massa tautan untuk membuka hasil scan tersebut.

#### **g. Menyusun agenda**

- 1) Bagaimana kesesuaian Divisi Perencanaan program dan Data dalam menyusun program dengan pelaksanaan yang ada di lapangan?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Terkait dengan kesesuaian ini sangat sesuai karena perencanaan penganggarannya ini berdasar pada tahapan semuanya, jadi sesuai meskipun dalam perjalanannya nanti kita sudah sesuai yang dianggarkan tapi bisa terjadi seperti jumlah pasangan calon, kita kan menganggarkan 5 pasangan calon ternyata kan hanya 3 pasangan calon ini kan sebenarnya sudah sesuai, jadi*

*ketidaksesuaian ya karena faktor luar, dan bukan perencanaanya yang keliru itu bukan.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk penyusunan program dan anggaran sudah baik ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara setelah itu ditarik mundur kebelakang setiap Pemilu mengalokasikan 10 bulan efektif untuk Pemilukada.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Untuk penyusunan kita mengacu pada peraturan dan mekanisme yang ada dan biasanya memang sudah ada dari tingkat KPU pusat tinggal divisi mau melaksanakan dengan rentang waktu yang telah ditentukan.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pelaksanaan yang ada dilapangan sudah sesuai, karena sebelum pelaksanaan kami selalu berkoordinasi.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa Untuk penyusunan program dan anggaran sudah baik ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara setelah itu ditarik mundur kebelakang setiap Pemilu mengalokasikan 10 bulan efektif untuk Pemilukada. Dan untuk penyusunan mengacu pada peraturan dan mekanisme yang ada dan biasanya memang sudah ada dari tingkat KPU pusat tinggal divisi mau melaksanakan dengan rentang waktu yang telah ditentukan, dan pelaksanaan yang ada dilapangan sudah sesuai, karena sebelum pelaksanaan kami selalu berkoordinasi.

- 2) Bagaimana kinerja Divisi Perencanaan program dan Data dalam menyusun agenda pemutakhiran data dan sistem informasi?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sangat baik saya rasa karena agenda pemutakhiran itu secara anggaranya itu sudah sangat rinci sekali, dari tahap step by step itu sudah dijalankan.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam menyusun agenda pemutakhiran data dan sistem informasi sudah baik karena mengacu pada PKPU yang sudah ada.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sama dengan poin pertama semua mengacu pada mekanisme dan PKPU yang ada, tinggal divisi menyesuaikan dengan rentang waktu yang telah ditentukan.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kinerja dalam menyusun agenda pemutakhiran data kita sesuai dengan peraturan KPU yang berlaku.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam menyusun agenda pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Tegal mengacu pada PKPU yang berlaku.

- 3) Bagaimana kinerja Divisi Perencanaan program dan Data dalam menyusun scan hasil Pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Iya sangat baik, karena bisa anda lihat sendiri di websitenya dan sampai hari juga masih bisa dilihat per TPS nya juga ada.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam agenda penyusunan hasil scan sudah baik dan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi objek dari tahapan Pemilukada serentak 2018.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam agenda penyusunan hasil scan juga masih sama kita mengikuti mekanisme yang sudah ada*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pada dasarnya ini bukanlah tupoksi dari Divisi Perencanaan Program dan Data. Kami sifatnya memback up. Jadi kami semaksimal mungkin membantu.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa dalam menyusun hasil scan KPU Kabupaten Tegal selalu mengikuti mekanisme yang ada dan setiap kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan objek dari tahapan Pemilukada serentak tahun 2018.

#### 4) Bagaimana kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data dalam menyusun agenda pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Baik, iya sudah sangat baik.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam menyusun agenda pelaporan dan evaluasi sudah kami jalankan sesuai tahapan.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Menyusun agenda pelaporan dan evaluasi juga melalui mekanisme yang sudah di tentukan, jadi intinya adalah dari semua poin yang telah disebutkan KPU Kabupaten Tegal mengikuti arahan dan mekanisme sesuai dengan PKPU yang sudah ada.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kinerja dalam pelaporan dan evaluasi kami menjalankan sesuai dengan tahapan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa untuk menyusun agenda hasil pelaporan dan evaluasi KPU Kabupaten Tegal mengikuti mekanisme dan mengacu pada PKPU yang ada serta disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang ada.

Berdasarkan jawaban dari 4 pertanyaan diatas mengenai menyusun agenda peneliti simpulkan bahwa untuk penyusunan program dan anggaran sudah baik ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara setelah itu ditarik mundur kebelakang setiap Pemilu mengalokasikan 10 bulan efektif untuk Pemilukada, selanjutnya bahwa dalam menyusun agenda pmutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Tegal mengacu pada PKPU yang berlaku. Kemudian dalam menyusun hasil scan KPU Kabupaten tegal selalu mengikuti mekanisme yang ada dan setiap kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan object daritahapan Pemilukada serentak tahun 2018, begitu pula untuk menyusun agenda hasil pelaporan dan evaluasi KPU Kabupaten Tegal mengikuti mekanisme dan mengacu pada PKPU

Dari 2 kesimpulan diatas mengenai menggali kebutuhan masyarakat dan menyusun agenda dapat disimpulkan lagi bahwa untuk indikator responsivitas, mengenai menggali kebutuhan masyarakat peneliti simpulkan bahwa dalam setiap tahapan pmutakhiran data pemilih Divisi Perencanaan Program dan Data selalu menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat melalui PPS hal tersebut juga

dilakukan Divisi Perencanaan Program dan Data dengan memberikan informasi-informasi ter akurat. Dan selanjutnya bahwa untuk penyusunan program dan anggaran sudah baik ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara setelah itu ditarik mundur kebelakang setiap Pemilu mengalokasikan 10 bulan efektif untuk Pemilukada, selanjutnya bahwa dalam menyusun agenda pemutakhiran data pemilih Divisi Perencanaan Program dan Data mengacu pada PKPU yang berlaku. Kemudian dalam menyusun hasil scan Divisi Perencanaan pRogram dan Data selalu mengikuti mekanisme yang ada dan setiap kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan object dari tahapan Pemilukada serentak tahun 2018, begitu pula untuk menyusun agenda hasil pelaporan dan evaluasi KPU Kabupaten Tegal mengikuti mekanisme dan mengacu pada PKPU.

#### **D. Responsibilitas**

- 1) Bagaimana kesesuaian aturan atau prinsip-prinsip administrasi terhadap penyusunan program dan anggaran Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Mengingat bahwa rencana yang kita buat itu berdasarkan pada Permendagri dan juga dengan tahapan yang ada, kita dalam pelaksanaan sangat sesuai karena kita berdasarkan sudah pada rambu-rambu ataupun sebagai dasar dari sebuah membuat perencanaan, jadi sangat sesuai.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kesesuaian atau prinsip-prinsip administrasi terhadap penyusunan program dan anggaran sudah sesuai karena mengacu pada rencana strategis KPU RI kami menjalankan Renstra tersebut.*



Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pada dasarnya kami menjalankan Renstra (Rencana Strategis) KPU RI. Jika ada hal yang tidak sesuai maka kami berkoordinasi dan melakukan revisi kegiatan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa aturan dalam penyusunan program dan anggaran dibuat berdasarkan permendagri dan juga tahapan yang ada, serta mengacu pada Rencana Strategis KPU RI serta selalu melakukan koordinasi dan melakukan revisi anggaran jika ada yang tidak sesuai dengan bahan acuan tersebut.

- 2) Bagaimana kesesuaian aturan atau prinsip-prinsip administrasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data dan sistem informasi Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Ini ya sama, kalau kesesuaian aturan itu semuanya sama kita tidak bisa kemudian tahu-tahu buat kesesuaian aturan sendiri. Ini jawabanya sama, ini aturanya sama kalau tidak dasar dari Permendagri ataupun dari PKPU nanti pun ada hasil akhir yang sifatnya ini adalah prodak hukum lagi, berupa surat edaran bisa juga hasil rapat kordinasi yang berupa surat, jadi semuanya harus punya dasar untuk pelaksanaan.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam kesesuaian aturan dan prinsip-prinsip administrasi kita sudah sesuai karena sudah di tetapkan dari KPU Provinsi dan KPU RI.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam pemutakhiran kami menggunakan aturan atau prinsip-prinsip administrasi dari KPU Provinsi dan KPU RI.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kesesuaian aturan atau prinsip-prinsip administrasi Divisi Perencanaan Program dan Data dalam pemutakhiran data pemilih mengacu pada Permendagri, PKPU, dan Prinsip administrasi KPU Pusat dan KPU Provinsi.

3) Bagaimana kesesuaian aturan atau prinsip-prinsip administrasi terhadap penyusunan program dan anggaran Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam penyusunan program dan anggaran sangat sesuai mbak.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam penyusunan program dan anggaran sudah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dalam penyusunan program dan anggaran sudah sesuai.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa kesesuaian aturan atau prinsip-prinsip administrasi terhadap penyusunan program dan data sudah sangat baik, karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan diatas mengenai responsibilitas peneliti simpulkan bahwa kesesuaian aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada di KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini Divisi Perencanaan Program dan Data mengacu pada aturan yang sudah ada seperti Permendagri, PKPU, serta prinsip Administrasi yang

ada di tingkatan lebih tinggi Seperti KPU Provinsi dan KPU Pusat, untuk kesesuaian aturan dalam perencanaan anggaran KPU Kabupaten Tegal hanya menjalankan Rencana Setrategis atau Renstra yang telah dibuat Oleh KPU RI, KPU Kabupaten Tegal hanya merevisi sesuai dengan jumlah kebutuhan.

#### **E. Akuntabilitas**

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data terhadap penyusunan program dan anggaran?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan :

*Tingkat akuntabilitasnya baik dalam penyusunan program dan anggaran diselesaikan dengan baik.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tingkat akuntabilitas terhadap penyusunan program dan anggaran sudah baik, melihat dari ketaatan melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan, kedisiplinan menggunakan jadwal waktu, dan komitmen terhadap aspirasi dalam setiap kegiatan sudah tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Penyusunan program dan anggaran sudah dilakukan jauh-jauh hari dan sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Mulai dari anggaran sarpras dan lain sebagainya, KPU sudah melakukan dengan sangat baik*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Terlaksananya pelaksanaan Pemilukada serentak 2018 di KPU Kabupaten Tegal merupakan bagian dan akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tingkat akuntabilitas KPU Kabupaten Tegal khususnya divisi Perencanaan Program dan Data sudah sangat baik semua itu tidak lepas dari kedisiplinan menggunakan jadwal waktu serta komitmen terhadap aspirasi setiap kegiatan yang telah di tetukan, penyusunan program anggaran juga sudah dilakukan jauh-jauh hari serta dilakukan dengan mekanisme yang ada, salah satu indicator keberhasilan tersebut adalah terlaksana Pemilukada serentak tahun 2018 di KPU Kabupaten Tegal dengan kondusif.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana kesesuaian akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data terhadap pemutakhiran data dan sistem informasi yang berkaitan?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan :

*Kesesuaian, mengingat divisi yang lain tidak mengelola terkait dengan data maka disini kesesuaiannya sangat sesuai karena di divisi lain tidak bakalan ngomong terkait data lagi tapi perencanaan program dan data ini lebih pada pemutakhiran data-data yang sudah sangat sesuai.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kesesuaian akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data dalam pemutakhiran dan sistem informasi sudah baik dengan terbuktinya tingkat partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan Pemilukada serentak 2018.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pelaksanaan tahapan di pemutakhiran data dan sistem informasi terbilang cukup baik dibuktikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat terutama dalam hal data pemilih, adanya keterbukaan dan ruang untuk masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan dalam daftar pemilih dirasakan sudah cukup untuk membuktikan bahwa KPU Kabupaten Tegal sudah akuntabel dan terbuka dalam hal daftar pemilih.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan Pemilukada serentak 2018 bagian dari akuntabilitas pemutakhiran.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa akuntabilitas pemutakhiran data pemilih dapat dilihat dari beberapa aspek yang telah di capai oleh Divisi Perencanaan Program dan Data diantaranya adalah Tingkat Partisipasi yang tinggi , serta mengikut sertakan masyarakat dalam hal pengawasan adalah bukti akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data dalam hal pemutakhiran data pemilih.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data terhadap pengelolaan jaringan IT?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan :

*Sangat baik, tingkat akuntabilitas terkait pengelolaan jaringan IT itu sangat baik.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan jaringan IT dalam setiap tahap sudah baik, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait Pemilukada serentak 2018.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Dibuktikan dengan tidak adanya kendala yang berarti dalam setiap tahap baik dalam pemutakhiran data serta koordinasi dengan stakeholder terkait membuat semua kegiatan berjalan dengan baik.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Masyarakat dapat mengatasi segala sesuatu terkait informasi seputar Pemilu serentak 2018 melalui media sosial.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan jaringan IT juga dapat dilihat dari informasi-informasi yang diberikan oleh Divisi Perencanaan Program dan Data melalui media sosial terkait Pemilu tahun 2018 yang mudah diterima oleh masyarakat, serta tidak adanya kendala dalam setiap tahap pemutakhiran menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas sudah sangat baik.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data terhadap hasil scan Pemilu serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan :

*Ini juga sama, sangat baik terkait hasil scan Pemilu serentak 2018 karena hasilnya sampai hari inipun masih bisa dilihat oleh masyarakat banyak.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sudah baik, karena sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan hasil scanning Pemilu serentak 2018.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan scanning hasil Pemilukada serentak 2018.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data baik dan Divisi Perencanaan Program dan Data berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hasil scanning agar mendapatkan hasil yang maksimal, dimana hasil scan tersebut hingga saat ini masih bisa dilihat oleh masyarakat luas.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

Menurut M. Fasihin, SE.MM, (selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan :

*Tingkat akuntabilitas dari Divisi Perencanaan Program dan Data terkait dengan evaluasi dan pelaporan ini baik sekali karena yang kita laporkan diterima semuanya meskipun tidak seratus persen baik sekali, tetapi bisa dikatakan baik, terkait pihak-pihak terkait sudah menerima hasil laporan maupun evaluasi yang kita lakukan, dari segi keuangan dari BPK kan sudah celar, ada kekeliruan wajar, dan sudah kita perbaiki dan kita selesaikan.*

Menurut Drs. Sujadi (selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tegal) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Sudah baik, dilihat dari terlaksananya semua kegiatan perencanaan program yang telah ditetapkan pada akuntabilitas data adalah terukur tingkat kualitas dan akurasi.*

Menurut Arief Syarifudin, SIP, (selaku Ka Subag Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Pelaksanaan tahapan di setiap jenjang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, keterbukaan itu mulai dari tahap penyusunan program anggaran pemutakhiran data pemilih sampai dengan proses pelaporan selesai.*

Menurut Ibnu Arif Nugroho (selaku Anggota/ staff Perencanaan Program dan Data) pada tanggal 17 Juli 2019, mengatakan:

*Telah dilantiknya Bupati Tegal 2018-2023 bukti akuntabilitas pelaporan dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Tegal.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa salah satu indikator dari tingkat akuntabilitas pelaporan dan evaluasi adalah terselenggaranya pemilu/kada dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali dengan dibuktikan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2018-2023, memang ada sedikit kendala dalam penyusunan laporan dan evaluasi tetapi semua sudah di audit oleh BPK dan tidak ada kendala sama sekali.

Berdasarkan jawaban dari 5 pertanyaan diatas mengenai akuntabilitas peneliti simpulkan bahwa tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data khususnya divisi Perencanaan Program dan Data sudah sangat baik semua itu tidak lepas dari kedisiplinan menggunakan jadwal waktu serta komitmen terhadap aspirasi setiap kegiatan yang telah di tetukan artinya ini dapat di lihat dari penyusunan program anggaran juga sudah dilakukan jauh-jauh hari serta dilakukan dengan mekanisme yang ada, Tingkat Partisipasi yang tinggi , serta mengikut sertakan masyarakat dalam hal pengawasan adalah bukti akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data dalam hal pemutakhiran data pemilih, jaringa it juga dapat dilihat dari informasi-informasi yang diberikan oleh KPU kabupaten Tegal melalui media sosial terkait Pemilu/kada tahun 2018, hasil scanning yang baik, dimana hasil scan tersebut hingga saat ini



masih bisa dilihat oleh masyarakat luas, kemudian pelaporan dan evaluasi adalah terselenggaranya pemilu dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali dengan dibuktikan telah dilantikanya Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2018-2023.

## **V.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2006), dimana definisi dari kinerja itu sendiri adalah suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk melakukan penilaian ataupun mengukur kinerja organisasi publik. Secara umum kinerja KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini Divisi Perencanaan Program dan Data yang dicermati dari aspek produktivitas dengan unit analisis: 1) sikap pegawai 2) kemampuan 3) semangat kerja, kualitas layanan dengan unit analisis: 1) kesalahan 2) kerusakan 3) kecermatan dalam melaksanakan tugas, responsivitas dengan unit analisis: 1) menggali kebutuhan masyarakat 2) menyusun agenda, responsibilitas, dan akuntabilitas berada dalam kondisi yang cukup baik tetapi ada beberapa kendala.

Produktivitas dalam indikator ini memiliki ukuran diantaranya : sikap pegawai yaitu dimana dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien, kemampuan dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya, semangat kerja yang diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas. Memunculkan temuan bahwa sikap pegawai secara keseluruhan sangat siap mulai dari tahap penyusunan anggaran yang memang sudah ada dalam PKPU no. 2 dan atas dasar keputusan Permendagri 54, dalam tahap penyusunan sendiri sudah dimulai tiga tahun sebelum pelaksanaan Pemilkada, begitupula dengan persiapan sarana penunjang lain seperti ketersediaan jaringan IT yang memang menjadi faktor penting dalam pemutakhiran data dan scan hasil pemilu yang nantinya dikirim ke server pusat KPU RI. Selanjutnya mengenai kemampuan, bahwa divisi perencanaan program dan data sudah baik artinya mampu merespon perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal, dan pegawai Divisi

Perencanaan Program dan Data selalu mengikuti bimtek yang diselenggarakan KPU Provinsi sesuai dengan Program Kerja yang telah ditentukan untuk meningkatkan kemampuan, begitu pula tingkat pendidikan sangat penting terutama kemampuan menguasai bidang IT karena dalam setiap tahap di divisi Program data dan Informasi selalu melibatkan komputerisasi terutama dalam pemutakhiran data pemilih. Kemudian mengenai semangat bekerja bahwa semangat kerja di divisi perencanaan program dan data itu harus baik, semangatnya memang harus baik karena kita bekerja berdasar deadline semuanya, ini terbukti dengan jumlah pemilih yang lebih dari 1 juta pemilih semua tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan, untuk mendapat data yang akurat dan valid dalam pemutakhiran data pemilih juga diperlukan ketelitian dalam bekerja, dan untuk evaluasi tidak terlepas dari kerjasama tim atau team work antara divisi satu dengan divisi yang lain saling memberikan support dalam setiap kegiatan, terbukti dengan rampungnya tahap pelaporan dan evaluasi sebelum batas akhir yang sudah ditentukan.

Adapun kualitas layanan bahwa tingkat kesalahan memang ada tetapi dapat di atasi dengan baik, kesalahan dalam penyusunan anggaran biasanya akan segera direvisi, begitu pula kendala-kendala yang muncul lebih banyak bersifat teknis seperti dalam server pusat yang sering mengalami gangguan dan dari sisi aplikasinya sendiri juga terkadang ada masalah untuk jaringan IT yaitu PT. Telkom, untuk kesalahan internal sendiri biasanya hanya masalah router, kesalahan dalam proses scan hasil pemilu memang masih ada tetapi akan segera diperbaiki sesuai dengan laporan yang ada, akan tetapi kendala yang ada dalam garis besar tersebut bersifat teknis dan dapat diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya mengenai kerusakan bahwa tidak ada kerusakan sama sekali baik itu dalam masalah jaringan IT ataupun hasil scan Pemilukada, memang ada

beberapa kerusakan terkait server KPU RI yang sempat di hack dan tidak dapat beroperasi untuk beberapa saat, tetapi untuk sarana dan prasarana di Divisi Perencanaan Program dan Data sendiri tergolong baik. Kemudian mengenai kecermatan dalam melaksanakan tugas bahwa tingkat kecermatan divisi sudah baik, dibuktikan dengan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik dan 1) Divisi Perencanaan Program dan Data telah melakukan pemutakhiran data sesuai dengan asas keterbukaan informasi public, 2) Masih terdapatnya masalah yang sering muncul dimasyarakat seperti halnya hasil wawancara dengan responden umum menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan public terhadap hasil kecermatan dalam menyusun daftar pemilih tergolong baik, kesalahan seperti pemilih ganda maupun pemilih TMS lainnya memang umum terjadi tetapi dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdapat pada tingkatan badan AdHock dibawah KPU Kabupaten Tegal. kemudian kecermatan dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilukada serentak sudah baik, artinya tidak terlepas dari koordinasi antara divisi dengan pihak terkait.

Adapun responsivitas bahwa untuk indikator responsivitas, mengenai menggali kebutuhan masyarakat bahwa dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih Divisi Perencanaan Program dan Data selalu menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat melalui PPS hal tersebut juga dilakukan Divisi Perencanaan Program dan Data dengan memberikan informasi-informasi ter akurat. Dan selanjutnya bahwa untuk penyusunan program dan anggaran sudah baik ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara setelah itu ditarik mundur kebelakang setiap Pemilu mengalokasikan 10 bulan efektif untuk Pemilukada, selanjutnya bahwa dalam menyusun agenda pemutakhiran data pemilih Divisi Perencanaan Program dan Data

mengacu pada PKPU yang berlaku. Kemudian dalam menyusun hasil scan Divisi Perencanaan program dan Data selalu mengikuti mekanisme yang ada dan setiap kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan object dari tahapan Pemilukada serentak tahun 2018, begitu pula untuk menyusun agenda hasil pelaporan dan evaluasi KPU Kabupaten Tegal mengikuti mekanisme dan mengacu pada PKPU.

Adapun responsibilitas bahwa kesesuaian aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada di KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini Divisi Perencanaan Program dan Data mengacu pada aturan yang sudah ada seperti Permendagri, PKPU, serta prinsip Administrasi yang ada di tingkatan lebih tinggi Seperti KPU Provinsi dan KPU Pusat, untuk kesesuaian aturan dalam perencanaan anggaran KPU Kabupaten Tegal hanya menjalankan Rencana Strategis atau Renstra yang telah dibuat Oleh KPU RI, KPU Kabupaten Tegal hanya merevisi sesuai dengan jumlah kebutuhan.

Adapun indikator yang terakhir Akuntabilitas bahwa tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data sudah sangat baik semua itu tidak lepas dari kedisiplinan menggunakan jadwal waktu serta komitmen terhadap aspirasi setiap kegiatan yang telah di tetukan artinya ini dapat di lihat dari penyusunan program anggaran juga sudah dilakukan jauh-jauh hari serta dilakukan dengan mekanisme yang ada, Tingkat Partisipasi yang tinggi , serta mengikut sertakan masyarakat dalam hal pengawasan adalah bukti akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data dalam hal pemutakhiran data pemilih, jaringan IT juga dapat dilihat dari informasi-informasi yang diberikan oleh Divisi Perencanaan Program dan Data melalui media sosial terkait Pemilukada tahun 2018, hasil scanning yang baik, dimana hasil scan tersebut hingga saat ini masih bisa dilihat oleh masyarakat luas, kemudian pelaporan dan evaluasi adalah

terselenggaranya Pemilukada dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali dengan dibuktikan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2018-2023

Apabila dikaitkan dengan yang dijadikan landasan penelitian sebagaimana yang dikatakan Agus Dwiyanto (2006) yang menyampaikan bahwa aspek kinerja bisa dicermati dari indikator 1) Produktivitas 2) Kualitas Layanan 3) Responsivitas 4) Responsibilitas 5) Akuntabilitas. Dalam praktek ternyata telah diimplementasikan oleh jajaran Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal.

Mengacu pada temuan penelitian, ternyata kendala-kendala yang dijumpai dilapangan adalah Faktor penghambat dari Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2018. (Divisi Perencanaan Program dan Data) yaitu masih terdapatnya kendala di beberapa tahapan Pemilukada serentak kurangnya SDM dalam Divisi Perencanaan Program dan Data, dan terutama dalam penyusunan daftar pemilih menjadi catatan yang perlu di perhatikan, tapi secara keseluruhan dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada serentak tahun 2018 di KPU Kabupaten Tegal sudah cukup baik hal tersebut dilihat dari respon masyarakat yang cukup baik dalam setiap informasi yang dipublikasikan ke masyarakat terutama dalam Daftar Pemilih, yang dipublikasikan setiap tahapan pemilih selesai dilaksanakan, dan antusias masyarakat yang cukup baik untuk menggunakan hak pilihnya pada tahapan Pemilukada di Kabupaten Tegal tahun 2018.

Untuk mengatasi kendala yang ada dalam penelitian ini maka solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh Divisi Perencanaan Program dan Data untuk masalah perencanaan anggaran ditambah SDM (sumber daya manusia) untuk dapat meningkatkan hasil kerja. Selanjutnya untuk pemutakhiran data pemilih, karena ada beberapa kendala maka untuk server yang sering

mengalami gangguan dalam pemutakhiran data dibuatkan jadwal antar KPU Kabupaten/ Kota untuk menghindari lamanya proses aplikasi sidalih (sistem daftar pemilih dan selalu melibatkan masyarakat dalam memperhatikan daftar pemilih.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemilukada tahun 2018 (study kasus Divisi Perencanaan Program dan Data), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tahapan Pemilukada serentak tahun 2018 kinerja KPU Kabupaten Tegal khususnya Divisi Perencanaan Program dan Data dengan unit analisis produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas berjalan dengan baik artinya sikap pegawai secara keseluruhan sangat siap mulai dari tahap penyusunan anggaran yang memang sudah ada dalam PKPU no. 2 dan atas dasar keputusan Permendagri 54, dalam tahap penyusunan sendiri sudah dimulai tiga tahun sebelum pelaksanaan Pemilukada, begitupula dengan persiapan sarana penunjang lain seperti ketersediaan jaringan IT yang memang menjadi faktor penting dalam pemutakhiran data dan scan hasil pemilu yang nantinya dikirim ke server pusat KPU RI, kualitas layanan dalam melaksanakan tugas bahwa tingkat kecermatan divisi sudah baik, dibuktikan dengan berjalannya program-program yang telah disusun dengan baik dan 1) Divisi Perencanaan Program dan Data telah melakukan pemutakhiran data sesuai dengan asas keterbukaan informasi public, 2) Masih terdapatnya masalah yang sering muncul dimasyarakat seperti halnya hasil wawancara dengan responden umum menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan public terhadap hasil kecermatan dalam menyusun daftar pemilih tergolong baik, kesalahan seperti pemilih ganda maupun pemilih TMS lainnya memang umum terjadi tetapi dapat disimpulkan



bahwa kesalahan terdapat pada tingkatan badan AdHock dibawah KPU Kabupaten Tegal. Selanjutnya responsivitas bahwa dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih Divisi Perencanaan Program dan Data selalu menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat melalui PPS hal tersebut juga dilakukan Divisi Perencanaan Program dan Data dengan memberikan informasi-informasi ter akurat. Kemudian responsibilitas bahwa kesesuaian aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada di KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini Divisi Perencanaan Program dan Data mengacu pada aturan yang sudah ada seperti Permendagri, PKPU. Kemudian akuntabilitas bahwa tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data sudah sangat baik semua itu tidak lepas dari kedisiplinan menggunakan jadwal waktu serta komitmen terhadap aspirasi setiap kegiatan yang telah di tetukan artinya ini dapat di lihat dari penyusunan program anggaran juga sudah dilakukan jauh-jauh hari serta dilakukan dengan mekanisme yang ada, Tingkat Partisipasi yang tinggi , serta mengikut sertakan masyarakat dalam hal pengawasan adalah bukti akuntabilitas Divisi Perencanaan Program dan Data

2. Faktor penghambat dari Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2018. (Divisi Perencanaan Program dan Data) yaitu masih terdapatnya kendala di beberapa tahapan Pemilukada serentak kurangnya SDM dalam Divisi Perencanaan Program dan Data, dan terutama dalam penyusunan daftar pemilih menjadi catatan yang perlu di perhatikan, tapi secara keseluruhan dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada serentak tahun 2018 di KPU Kabupaten Tegal sudah cukup baik hal tersebut dilihat dari respon masyarakat yang cukup baik dalam setiap informasi yang dipublikasikan ke masyarakat terutama dalam Daftar Pemilih, yang dipublikasikan setiap tahapan pemilih selesai dilaksanakan, dan antusias

masyarakat yang cukup baik untuk menggunakan hak pilihnya pada tahapan Pemilukada di Kabupaten Tegal tahun 2018.

3. Solusi dari kendala Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam Penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2018. (Divisi Perencanaan Program dan Data) yaitu Divisi Perencanaan Program dan Data untuk masalah perencanaan anggaran ditambah SDM (sumber daya manusia) untuk dapat meningkatkan hasil kerja. Selanjutnya untuk pemutakhiran data pemilih, karena ada beberapa kendala maka untuk server yang sering mengalami gangguan dalam pemutakhiran data dibuatkan jadwal antar KPU Kabupaten/ Kota untuk menghindari lamanya proses aplikasi sidalih (sistem daftar pemilih dan selalu melibatkan masyarakat dalam memperhatikan daftar pemilih.

## **VI.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi (saran) sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini Divisi Perencanaan Program dan Data harus menambah SDM (sumber daya manusia) agar dapat meningkatkan kinerja dan lebih baik lagi untuk tahapan-tahapan Pemilu berikutnya.
2. KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini Divisi Perencanaan Program dan Data harus selalu berkomunikasi dan ber koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan stakeholder terutama dalam penyusunan daftar pemilih yang penulis anggap masih terdapat masalah.
3. KPU Kabupaten Tegal dalam hal ini Divisi Perencanaan Program dan Data harus selalu melibatkan masyarakat sebagai control public terutama dalam penyusunan daftar pemilih yang memang dianggap sebagai salah satu output terpenting dalam tahapan pemilukada tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad s. Rucky. 2006. *Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen SDM buku I*. Jakarta: indeks
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gomes, Faustino Cardoso, Dr. 2003. *MSDM*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, J. Lexy. 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ruky, Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Siagian, Sondang. 2002. *Manajemen SDM* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Pers

Sumber Peraturan:

**Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 6 tahun 2008** tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

**Undang-undang No 7 tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum

**UU Nomor 10 Tahun 2016** tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

**UU Nomor 8 Tahun 2015** perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

**UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

**UU Nomor 12 Tahun 2008** tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **1. Judul Penelitian**

**KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN  
2018. (STUDY KASUS DIVISI PERENCANAAN PROGRAM DAN  
DATA)**

### **2. Petunjuk Wawancara :**

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti mohon kesediaan Bapak /Ibu/Saudara untuk memberikan informasi mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tegal 2018 (Study Kasus Divisi Perencanaan Program dan Data) . Keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, Untuk itu di mohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap jujur, dan benar.

### **3. Identitas Informan**

Nama : .....

Jenis Kelamin : L/P

Pekerjaan (Jabatan) : .....

Alamat : .....

Tingkat Pendidikan : .....

Pertanyaan Wawancara

## 1. Kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data

### **A. Produktivitas dengan unit analisis:**

#### a) Sikap pegawai

1. Bagaimana sikap pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan program dan anggaran?
2. Bagaimana sikap pegawai dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilukada serentak 2018?
3. Bagaimana sikap pegawai Divisi perencanaan program dan data apabila terjadi kendala pada pengelolaan jaringan IT?
4. Apa respon masyarakat terhadap scan hasil pemilukada serentak 2018?
5. Bagaimana sikap pegawai dalam pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu?

#### b) Kemampuan

1. Bagaimana kemampuan pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan program dan anggaran?
2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan pegawai dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilukada serentak 2018?
3. Bagaimana kemampuan anggota Divisi perencanaan program dan data dalam mengelola jaringan IT?
4. Bagaimana kemampuan anggota Divisi perencanaan program dan data dalam scan hasil pemilukada serentak 2018?
5. Bagaimana kemampuan anggota Divisi perencanaan program dan data dalam pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

#### c) Semangat bekerja

1. Bagaimana semangat kerja pegawai Divisi Perencanaan Program dan Data dalam penyusunan program dan anggaran?
2. Bagaimana semangat kerja pegawai dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilukada serentak 2018?
3. Bagaimana semangat kerja pegawai Divisi perencanaan program dan data dalam pengelolaan jaringan IT?
4. Bagaimana semangat kerja anggota Divisi perencanaan program dan data dalam scan hasil pemilukada serentak 2018?
5. Bagaimana semangat kerja anggota Divisi perencanaan program dan data dalam pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

**B. Kualitas Layanan dengan unit analisis:**

a) Kesalahan

1. Bagaimana tingkat kesalahan dalam penyusunan program dan anggaran?
2. Apakah ada kendala dan kesalahan dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilukada serentak 2018?
3. Bagaimana tingkat kesalahan dalam pengelolaan jaringan IT?
4. Apakah ada kesalahan dalam hasil scan Pemilukada serentak 2018?
5. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

b) Kerusakan

1. Apakah ada kerusakan terkait sarana prasarana dalam pengelolaan jaringan IT pada pemilukada serentak 2018?

2. Apakah ada kerusakan dalam hasil scan pemilukada serentak 2018?

c) Kecermatan dalam melaksanakan tugas

1. Bagaimana tingkat kecermatan anggota Divisi perencanaan program dan data dalam penyusunan program dan anggaran?
2. Bagaimana kecermatan dalam pemutakhiran data pemilih dan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilukada serentak 2018?
3. Bagaimana tingkat kecermatan anggota Divisi perencanaan program dan data dalam pengelolaan jaringan IT?
4. Bagaimana kecermatan anggota Divisi perencanaan program dan data dalam hasil scan Pemilukada serentak 2018?
5. Bagaimana kecermatan anggota Divisi perencanaan program dan data data dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

**C. Responsivitas dengan unit analisis:**

a) Menggali kebutuhan masyarakat

1. Bagaimana Divisi Perencanaan Program dan Data dalam melaksanakan pemutakhiran data dan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
2. Bagaimana Divisi Perencanaan Program dan Data dalam menyampaikan scan hasil pemilu untuk kebutuhan masyarakat?
3. Bagaimana Divisi Perencanaan Program dan Data dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu untuk kebutuhan masyarakat?

b) Menyusun agenda



1. Bagaimana kesesuaian Divisi Perencanaan Program dan Data dalam menyusun program dengan pelaksanaan yang ada dilapangan?
2. Bagaimana kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data dalam menyusun agenda pemutakhiran data dan sistem informasi?
3. Bagaimana kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data dalam menyusun scan hasil pemilukada serentak 2018?
4. Bagaimana kinerja Divisi Perencanaan Program dan Data dalam menyusun agenda pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018?

#### **D. Responsibilitas**

- a) Bagaimanakah kesesuaian aturan atau prinsip-prinsip administrasi terhadap penyusunan program dan anggaran Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal ?
- b) Bagaimana kesesuaian aturan atau prinsip-prinsip administrasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data dan sistem informasi Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal ?
- c) Bagaimana kesesuaian aturan atau prinsip-prinsip administrasi terhadap pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kabupaten Tegal ?

#### **E. Akuntabilitas**

1. Bagaimana tingkat akuntabilitas Divisi Perencanan Pogram dan Data terhadap penyusunan program dan anggaran?
2. Bagaimana kesesuaian akuntabilitas Divisi Perencanan Pogram dan Data terhadap pemutakhiran data dan sistem informasi yang berkaitan?

3. Bagaimana tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Pogram dan Data terhadap pengelolaan jaringan IT?
4. Bagaimana akuntabillitas Divisi Perencanaan Pogram dan Data terhadap hasil scan Pemilukada serentak 2018?
5. Bagaimana tingkat akuntabilitas Divisi Perencanaan Pogram dan Data dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi tahapan pemilukada serentak 2018 ?

TERIMA KASIH